

KATALOG BPS : 4102004.71



2016

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Potret capaian investasi sektor pendidikan

SULAWESI UTARA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA



2016

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Potret capaian investasi sektor pendidikan

SULAWESI UTARA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SULAWESI UTARA

*''Potret capaian investasi sektor pendidikan di Provinsi
Sulawesi Utara''*

2016

ISBN

Nomor Publikasi 71550.1707

Katalog BPS 402004.71

Ukuran Buku 18 X 25 cm

Jumlah Halaman 85 halaman

Naskah

Ajiwasesa Harumeka, SST

Editor

Norma Regar, S.Si., M.Si.

Titien Kristiningsih, SST, SE, MSi

Gambar Kulit

Arif Muttaqin, SST

Diterbitkan oleh

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

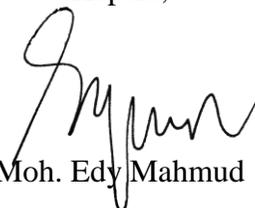
KATA PENGANTAR

Program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Karena masyarakat adalah subjek sekaligus menjadi objek pembangunan. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian program pembangunan dalam wacana kesejahteraan rakyat, maka BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyedia data, menerbitkan publikasi berjudul **Indikator Kesejahteraan Rakyat Sulawesi Utara 2016**.

Ada perbedaan format publikasi ini dengan rilis tahun sebelumnya. Kedepan, setiap publikasi indikator kesejahteraan rakyat akan memilih suatu tema yang akan diangkat. Publikasi ini mengangkat tema "Potret capaian investasi sektor pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara". Infografis pada setiap awal bab pada publikasi ini menggunakan *web service* www.piktochart.com.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini, disampaikan terima kasih.

Manado, 21 November 2017
Kepala,



Moh. Edy Mahmud

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Sumber Data	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
2. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD INVESTASI DI SEKTOR PENDIDIKAN	7
2.1 Ketersediaan Sarana Fisik Sekolah	7
2.2 Ketersediaan Guru	15
2.3 Alokasi Anggaran Pendidikan	20
2.3 Sarana Prasarana Transportasi	21
3. CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN SULAWESI UTARA SEBAGAI HASIL PEROLEHAN INVESTASI DI SEKTOR PENDIDIKAN	29
3.1 Perkembangan Tingkat Pendidikan	29
3.2 Peran Sarana dan Prasarana Pendidikan Serta Prasarana Pendukung Terhadap Tingkat Pendidikan	34
3.3 Peran Tingkat Pendidikan Terhadap Perekonomian Masyarakat	43

4.	PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA	47
4.1	Kependudukan	47
4.2	Kesehatan dan Gizi	59
4.3	Taraf dan Pola Konsumsi	67
4.4	Perumahan dan Lingkungan	72
4.5	Kemiskinan	80
	DAFTAR PUSTAKA	85

<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Halaman

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD INVESTASI DI SEKTOR PENDIDIKAN

- 2.1 Jumlah SMP, SMA, dan Persentase Kecamatan yang Memiliki SMP dan SMA menurut Kabupaten/Kota 11

CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN SULAWESI UTARA SEBAGAI HASIL PEROLEHAN INVESTASI DI SEKTOR PENDIDIKAN

- 3.1 Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin, Tahun 2016 32
- 3.2 Rata-rata Lama Sekolah / *Mean Year Schooling* (MYS) menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014 - 2016 35

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA

- 4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara 49
- 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2016 52
- 4.3 Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen), 2015 – 2016 57
- 4.4 Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Klasifikasi Wilayah (persen), 2016 65
- 4.5 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2015 – 2016 69
- 4.6 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan, 2015 – 2016 73
- 4.7 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Fasilitas Perumahan, 2016 73
- 4.8 Persentase Rumah tangga menurut Kelayakan Huni Perumahan dan Kabupaten/Kota, 2016 78

4.9	Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Sulawesi Utara, 2015 - 2016	83
-----	--	----

<https://sulut.bps.go.id>

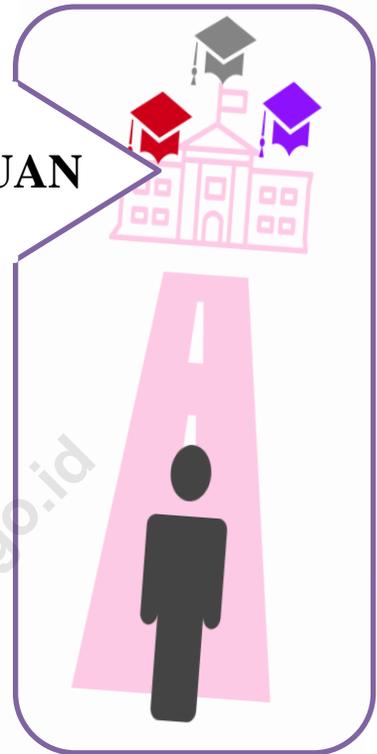
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Jumlah SD/Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016	9
2.2 Jumlah SD/Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016	9
2.3 Rasio Sekolah-Murid menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016	13
2.4 Jumlah Guru menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016	16
2.5 Rasio Guru-Murid menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016	17
2.6 Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Kabupaten/Kota, Tahun 2014	23
2.7 Persentase Desa/Kelurahan menurut Permukaan Jalan Darat dan Kabupaten/Kota, Tahun 2014	24
2.8 Persentase Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat menurut Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat dan Kabupaten/Kota, Tahun 2014	25
2.9 Persentase Desa/Kelurahan menurut Ketersediaan Angkutan Umum dan Kabupaten/Kota, Tahun 2014	26
3.1 Hubungan antara Jumlah Sekolah dengan Rata-Rata Lama Sekolah	37
3.2 Hubungan antara Rasio Sekolah-Murid dengan Rata-Rata Lama Sekolah	38
3.3 Hubungan antara Jumlah Guru dengan Rata-Rata Lama Sekolah	40
3.4 Hubungan antara Rasio Guru-Murid dengan Rata-Rata Lama Sekolah	41

3.5	Hubungan antara infrastruktur dengan Rata-Rata Lama Sekolah	42
3.6	Hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah dengan Tingkat Perekonomian Masyarakat	44
4.1	Angka Beba Ketergantungan Sulawesi Utara, 2011-2016	54
4.2	Angka Beban Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota, 2016	54
4.3	Rata-rata Lama Sakit dan Persentase Penduduk Sakit menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2016	61
4.4	Rata-rata Lama Pemberian ASI menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2016	62
4.5	Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap di Sulawesi Utara, 2016	62
4.6	Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Sulawesi Utara, 2016	65
4.7	<i>Gini Ratio</i> menurut Kabupaten/Kota, 2016	70
4.8	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Sulawesi Utara, 2016	70
4.9	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Sendiri di Sulawesi Utara, 2016	79
4.10	Persentase Penduduk Miskin, 2014 – 2016	83



PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

Menurut Todaro dan Smith (2011) yang dikutip di dalam publikasi Indikator Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016, salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara adalah laju pertumbuhan ekonomi yang dapat mencerminkan kemampuan pertambahan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Terdapat tiga komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal (termasuk semua investasi baru dalam tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan kerja), pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi.

Di dalam komponen akumulasi modal, ada salah satu sub komponen yang penting, yaitu modal manusia. Modal manusia merupakan istilah yang mengacu kepada pengembangan kapasitas manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi



lainnya untuk meningkatkan produktivitas. Pengembangan sumber daya manusia dinilai dapat menjadi penggerak kemajuan ekonomi suatu negara (Todaro & Smith, 2011). Investasi bidang modal manusia ini sama dengan bentuk investasi konvensional dalam modal fisik. Dengan adanya investasi awal terkait dengan perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan, pada masa mendatang akan dapat diperoleh aliran pendapatan yang lebih tinggi (Tommasi & Ierulli, 1995).

Salah satu pembangunan modal manusia yang penting adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pendidikan bagi manusia mampu memberikan pencerahan dalam kehidupan sehari-hari karena pendidikan dapat menghilangkan keyakinan yang salah di dalam pikiran manusia. Selain itu pendidikan juga dapat membantu manusia dalam menciptakan suatu gambaran yang jelas mengenai hal di sekitarnya, serta dapat menghilangkan kebingungan yang dialami. Orang dengan pendidikan yang tinggi biasanya akan lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah karena mereka sudah mempelajari ilmu pendidikan dalam kehidupan. Pentingnya pendidikan juga berperan dalam karir atau pekerjaan. Pendidikan sangat penting untuk melengkapi kemampuan seseorang dengan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan tujuan karir. Banyak orang yang memiliki cita-cita karena dengan memiliki cita-cita, seseorang akan lebih terarah. Dengan mengarahkan pendidikan pada bidang yang tepat memudahkan kita untuk mencapai cita-cita.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin sejahtera. Di Amerika Serikat (1992) seseorang yang berpendidikan doktor penghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dolar, master 40 juta dolar, dan sarjana 33 juta dolar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpenghasilan rata-rata 19 juta



dollar per tahun. Dalam lingkup yang lebih khusus, berdasarkan data Susenas Maret 2016 di Provinsi Sulawesi Utara, kepala rumah tangga yang berpendidikan S2/S3 memiliki pengeluaran rumah tangga per bulan sekitar 12 juta rupiah, D4/S1 sekitar 7,36 juta rupiah, D1/D2/D3 sekitar 5,53 juta rupiah, SMA/Sederajat sekitar 4,28 juta rupiah, SMP/Sederajat sekitar 3,26 juta rupiah, SD/Sederajat sekitar 3,07 juta rupiah, dan tidak memiliki ijazah sekitar 2,48 juta rupiah.

Penelitian mengenai pendidikan juga telah dilakukan oleh Nenden Budiarti. Nenden menganalisa tingkat pengembalian investasi bidang pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka kurang menguntungkan untuk bekerja di lapangan usaha pertanian (Nenden Budiarti, 2010). Penelitian tersebut seiring sejalan dengan fakta bahwa sebagian besar penduduk miskin mempunyai lapangan usaha di bidang pertanian. Artinya, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin sejahtera. Semakin sejahtera suatu daerah maka ketahanan ekonomi akan semakin meningkat.

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam membantu kemajuan suatu negara pada umumnya dan suatu daerah provinsi khususnya. Pendidikan dapat mengarahkan manusia menjadi lebih baik untuk kemajuan suatu daerah. Pendidikan yang baik, memberi harapan agar penduduk mampu menjalani hidup terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi ini. Pendidikan saja tidak cukup, namun juga memerlukan keahlian yang memadai untuk kemajuan suatu komunitas mulai dari level terkecil misalnya keluarga hingga level yang lebih besar seperti bangsa. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka diharapkan pembangunan daerah dapat



lebih terjamin dan mampu terus memajukan daerah di kancah nasional hingga internasional.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2016-2021 adalah terwujudnya Sulawesi Utara berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki visi yang berkenaan dengan pembangunan modal manusia, khususnya di bidang pendidikan, misi nomor 2, yaitu memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing. Pembangunan sumber daya manusia yang berkepribadian dan berdaya saing harus dicapai dengan akses pendidikan yang merata diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara, tanpa memandang suku, agama, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Diharapkan tidak ada lagi ketimpangan pencapaian pendidikan yang terjadi di masyarakat.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia juga merupakan salah satu misi pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Masalah pemerataan pendidikan di Sulawesi Utara juga sejalan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019.

2. Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan sebagai perwujudan dari misi nomor 2 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ketersediaan sarana fisik sekolah, kecukupan jumlah sekolah, ketersediaan guru, kecukupan guru, anggaran pendidikan, dan



sarana prasarana transportasi di daerah yang dapat menunjang akses pendidikan.

Publikasi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus memunculkan faktor-faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah di Sulawesi Utara dengan menggunakan analisis sederhana, yaitu *scatter plot*. Selain itu, juga memberikan gambaran terkait indikator kesejahteraan rakyat lainnya, seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan.

3. Ruang Lingkup

Publikasi indikator kesejahteraan rakyat 2016 ini menyajikan data dan informasi di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2014 – 2016. Data dan informasi yang disajikan pada publikasi ini menggambarkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Data tingkat provinsi disajikan menurut daerah tempat tinggal, urban/rural, sedangkan data tingkat kabupaten/kota tidak dapat disajikan menurut daerah tempat tinggal.

4. Sumber Data

Publikasi ini menggunakan sebagian besar data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Potensi Desa (Podes). Data lain dalam publikasi ini menggunakan data sektoral dari dinas-dinas terkait, khususnya dinas pendidikan dan kebudayaan dan kantor perwakilan kementerian agama Provinsi Sulawesi Utara.



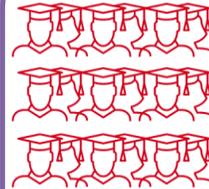
5. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 yang bertema “Potret Capaian Investasi Sektor Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara” ini dibagi kedalam 4 BAB. Sebagai pembuka, BAB 1 berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, sumber data yang digunakan, dan sistematika penulisan. BAB 2 membahas tentang capaian pembangunan sarana prasarana pendidikan di Sulawesi Utara, seperti jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, rasio ruang kelas terhadap murid, jumlah guru, rasio guru terhadap murid, alokasi anggaran bidang pendidikan di Sulawesi Utara. Selain itu, BAB 2 juga berisi tentang gambaran mengenai sarana prasarana lain yang dapat menunjang akses terhadap pendidikan, seperti kondisi jalan, jenis angkutan dan sarana transportasi yang tersedia. Di dalam BAB 3 terdapat gambaran capaian tingkat pendidikan yang ditandai oleh capaian APM, APS, APK, MYS, dan gini pendidikan. Pada BAB 3 juga terdapat analisis sederhana mengenai hubungan antara sarana dan prasarana terhadap capaian pendidikan menggunakan *scatter plot*. BAB 4 adalah bab pamungkas yang berisi indikator-indikator kesejahteraan rakyat lainnya, seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan.

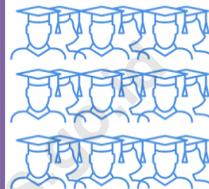


BAB II

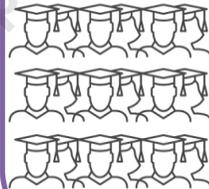
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN SEBAGAI WUJUD INVESTASI DI SEKTOR PENDIDIKAN



Setiap Guru SD mengajar 19 s.d. 20 murid



Setiap Guru SMP mengajar 14 s.d. 15 murid



Setiap Guru SMA mengajar 17 s.d. 18 murid

1. Ketersediaan sarana fisik sekolah

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utamayang mempengaruhi keberhasilan program penyelenggaraan pendidikan. Menurut Depdiknas (2008), sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Sedangkan menurut tim penyusun pedoman pembakuan media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan: Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sarana adalah alat yang digunakan secara langsung

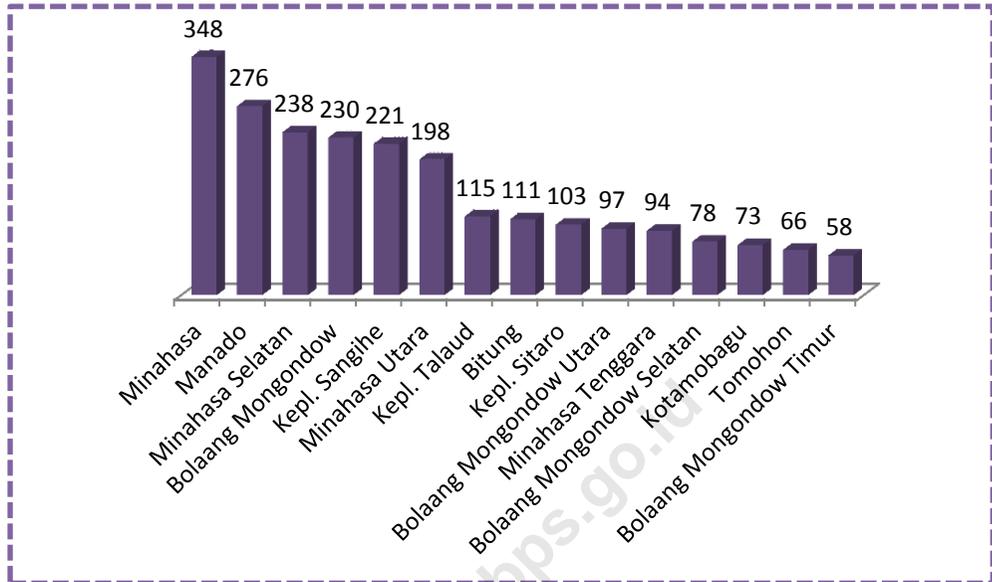


untuk mencapai tujuan misalnya ruang kelas, buku, papan tulis, dan lainnya. Sedangkan Prasarana adalah alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu: (i) Bangunan dan perabot sekolah, (ii) Alat pelajaran yang terdiri dari, pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium (iii) Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Pencapaian pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana serta peralatan yang cukup memadai dan berkualitas.

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa salah satu penyediaan sarana pendidikan adalah ketersediaan sekolah dan kapasitas ruang kelas yang dapat menampung siswa. Semakin banyak sekolah di suatu daerah akan semakin banyak menampung siswa sehingga akan meningkatkan partisipasi sekolah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dan dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2016, jumlah Sekolah Dasar/MI di Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.306. Jika dirinci lebih dalam lagi, terdapat 1.370 SD Negeri, 850 SD Swasta, dan 86 Madrasah Ibtida'iyah (MI). Minahasa merupakan daerah yang memiliki jumlah SD/MI paling banyak di Sulawesi Utara, yaitu sebanyak 348. Sedangkan yang paling sedikit adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu sebanyak 58. Tentunya angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara mentah-mentah karena jumlah penduduk tiap kabupaten/kota berbeda.

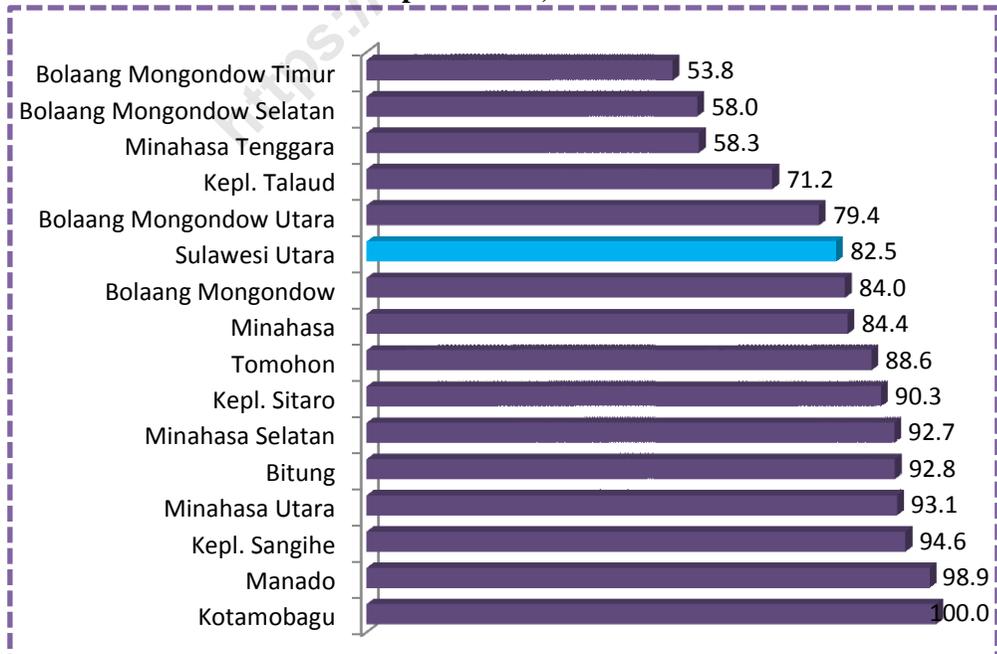


Gambar 2.1. Jumlah SD/Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016

Gambar 2.2. Jumlah SD/Sederajat di Provinsi Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016



Sumber : PODES, 2014



Data PODES tahun 2014 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 17,5 persen desa di Sulawesi Utara yang belum memiliki SD/MI. Jika dilihat menurut kabupaten/kota seperti pada gambar 2.2., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki persentase terbesar jumlah desa yang belum memiliki SD/MI, yaitu 53,8 persen, atau lebih dari setengah jumlah desa-desa di Bolaang Mongondow Timur tidak memiliki SD/MI. Sebaliknya, 100 persen atau seluruh desa di Kotamobagu sudah memiliki SD/MI. Hal itu mengindikasikan bahwa masih terlihat ketimpangan sarana SD/MI di Sulawesi Utara. Ada 3 Kabupaten dengan persentase jumlah desa yang memiliki SD/MI masih rendah, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (53,8 persen), Bolaang Mongondow Selatan (58,0 persen), dan Minahasa Tenggara (58,3 persen).

Keberadaan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menunjukkan hal yang berbeda dibandingkan SD/MI. Semua kecamatan di Sulawesi Utara sudah mempunyai SMP/MTs pada tahun 2014. Untuk jenjang SMA/SMK/MA, persentase Sulawesi Utara masih sekitar 88,02 persen. artinya masih ada 11,98 persen kecamatan di Sulawesi Utara belum memiliki SMA/SMK/MA. Ada 8 Kabupaten/Kota yang di semua kecamatannya sudah tersedia SMA/SMK/MA, yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Kota Manado, Bitung, Tomohon, dan Kotamobagu. Wilayah di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan persentase terbesar kecamatannya tidak mempunyai SMA/SMK/MA, sebesar 13,33 persen.

Secara absolut, SMP/MTs di Sulawesi Utara berjumlah 770. Sedangkan jumlah SMA/MA/SMK sebanyak 440. Di Kotamobagu jumlah SMP paling sedikit, yaitu 17 sekolah. Sebaliknya, yang terbanyak berada di Kabupaten Minahasa, yaitu 106 sekolah. Untuk jenjang



Tabel 2.1. Jumlah SMP, SMA, dan Persentase Kecamatan yang Memiliki SMP dan SMA menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah (2016)		Persentase kecamatan yang memiliki (2014):	
	SMP/MTs	SMA/MA/SMK	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
Bolaang Mongondow	75	37	100.00	86.67
Minahasa	106	48	100.00	88.00
Kepl. Sangihe	65	29	100.00	80.00
Kepl. Talaud	41	30	100.00	73.68
Minahasa Selatan	84	38	100.00	100.00
Minahasa Utara	74	38	100.00	100.00
Bolaang Mongondow Utara	27	12	100.00	100.00
Kepl. Sitaro	26	11	100.00	80.00
Minahasa Tenggara	43	19	100.00	66.67
Bolaang Mongondow Selatan	25	10	100.00	80.00
Bolaang Mongondow Timur	28	15	100.00	100.00
Manado	100	87	100.00	100.00
Bitung	36	30	100.00	100.00
Tomohon	23	18	100.00	100.00
Kotamobagu	17	18	100.00	100.00
Sulawesi Utara	770	440	100.00	88.02

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016 dan PODES, 2014



SMA/SMK/MA, jumlah sekolah terbanyak berada di Kota Manado, yaitu 87 sekolah. Sedangkan yang paling sedikit di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro berjumlah 11 sekolah.

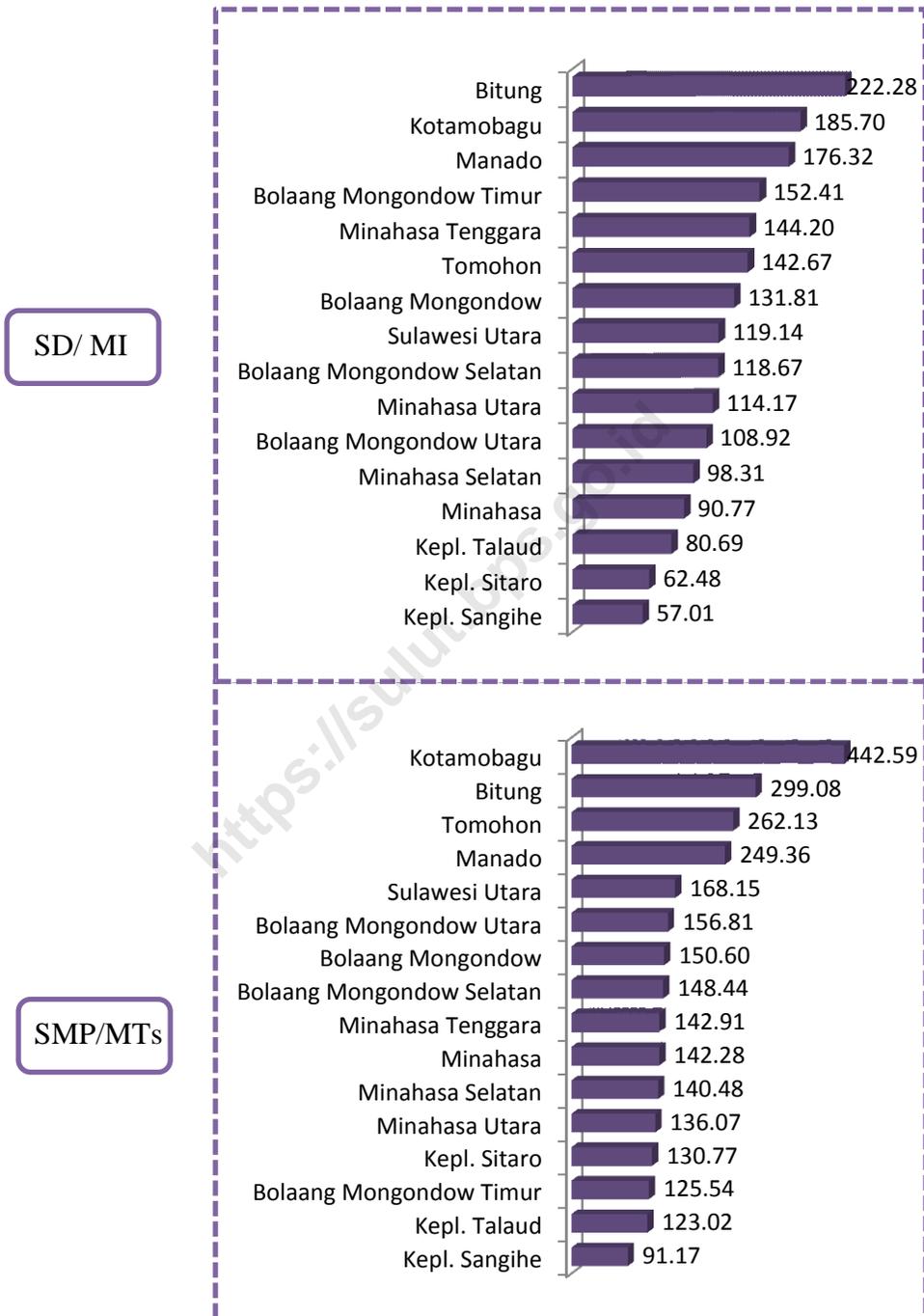
Selain ketersediaan sarana sekolah secara absolut, maka digunakan indikator lain untuk melihat daya tampung sekolah terhadap jumlah siswa. Indikator tersebut adalah rasio siswa per sekolah. Berdasarkan data dari dinas terkait untuk daya tampung siswa, yaitu rata-rata SD di Sulawesi Utara menampung 119 sampai 120 siswa, SMP menampung 168 sampai 169 siswa, dan SMA menampung 228 sampai 229 siswa.

Berdasarkan kabupaten/kota, daya tampung sekolah yang cukup tinggi berada pada wilayah kota, yaitu Kota Kotamobagu, Tomohon, Manado, dan Bitung. Pada jenjang SD, daya tampung terbanyak berada di Kota Bitung, yaitu berjumlah 222,28 siswa per sekolah. Ada 3 Kabupaten yang rasio per sekolahnya di bawah 90 orang, yaitu Kepulauan Talaud, Siau tagulandang Biaro, dan Sangihe. Selanjutnya pada jenjang SMP, rasio siswa per sekolah paling tinggi berada di Kota Kotamobagu. Sebaliknya, yang terendah berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu 91,17 siswa per sekolah.

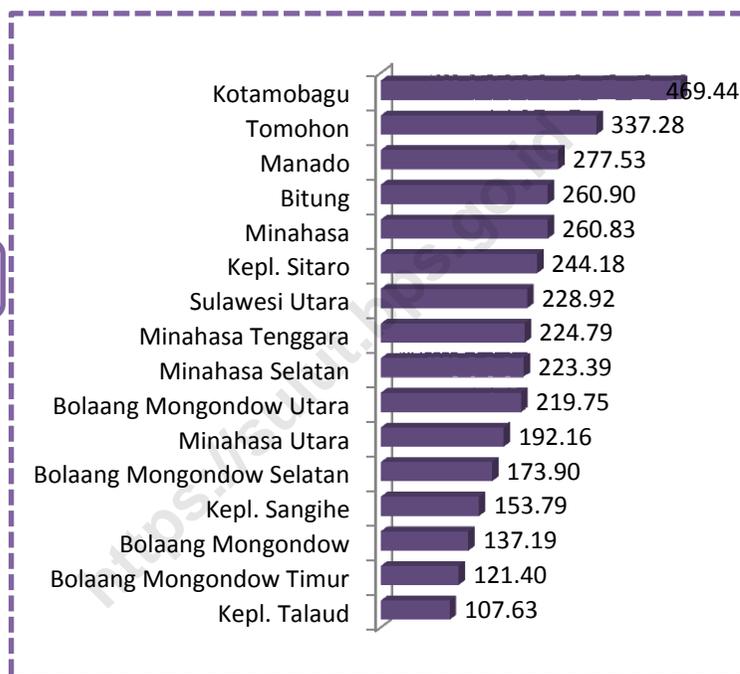
Pada jenjang pendidikan menengah atas, rasio siswa per sekolah menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan SD dan SMP. Jika dicermati menurut jenjang pendidikan, terlihat ada hubungan antara jenjang pendidikan dan rasio siswa per sekolah. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi pula rasio siswa per sekolah. Rasio siswa per sekolah di Sulawesi Utara menunjukkan angka 228,92. Rasio tertinggi berada di Kota Kotamobagu, sedangkan yang terendah berada pada Kabupaten Kepulauan Talaud.



Gambar 2.3. Rasio Sekolah-Murid menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016



SMA/MA/SMK



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016, diolah



2. Ketersediaan Guru

Kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan ditentukan oleh proses belajar mengajar, dimana dalam proses tersebut guru sebagai pendidik memegang peran yang penting. Seorang guru harus mampu mengembangkan suasana bebas bagi peserta didik untuk mengkaji apa yang menarik dan mampu mengekspresikan ide-ide dan kreativitas peserta didik dalam batas-batas norma-norma yang ditegakkan secara konsisten. Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah (Depdiknas, 2008). Hal ini disebabkan karena guru merupakan titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan.

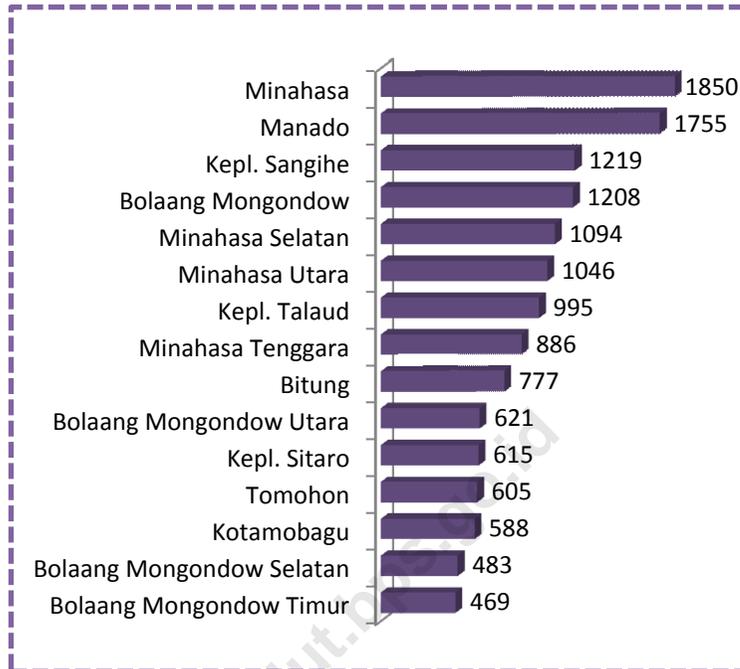
Secara absolut, Sulawesi Utara mempunyai 14.211 guru SD, 9.118 guru SMP, dan 5.690 guru SMA. Pada jenjang Sekolah Dasar, guru terbanyak berada di Kabupaten Minahasa, berjumlah 1.850 guru, sedangkan yang paling sedikit di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebanyak 469 guru. Serupa dengan jenjang Sekolah Dasar, Kabupaten Minahasa juga memiliki guru SMP terbanyak, berjumlah 1.289 guru, tetapi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki jumlah guru SMP yang paling sedikit, yaitu sebanyak 234 guru. Selanjutnya jenjang pendidikan Menengah Atas, jumlah guru terbanyak berada pada Kota Manado yang berjumlah 1.298 guru. Sedangkan yang paling sedikit berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yaitu 141 guru. Dari informasi tersebut, ternyata jumlah guru di Bolaang Mongondow Timur adalah yang paling sedikit mulai dari jenjang SD hingga SMA.

Penambahan tenaga pendidik yang tidak didasarkan kepada kebutuhan akan mengakibatkan peran guru yang tidak efektif. Hal



Gambar 2.4. Jumlah Guru menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016

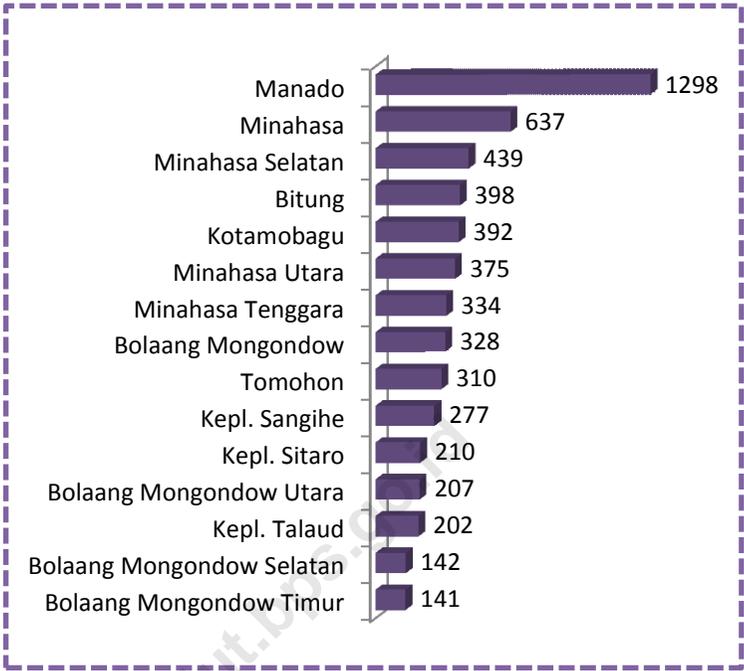
SD



SMP



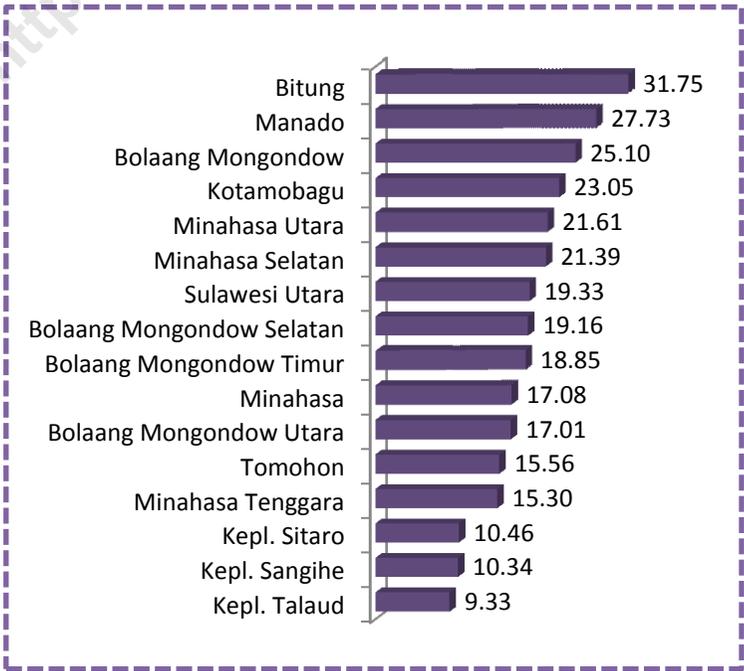
SMA



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016

Gambar 2.5. Rasio Guru-Murid menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016

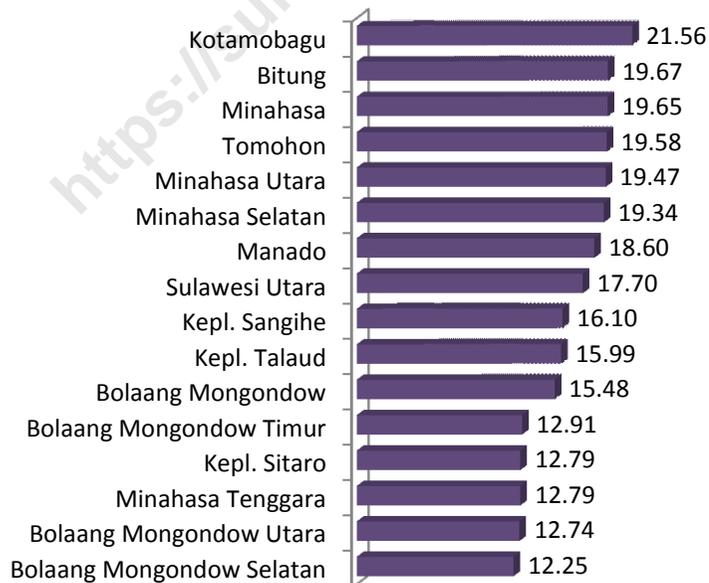
SD



SMP



SMA



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016, diolah



tersebut dapat diketahui dengan cara melihat rasio guru-murid. Menurut RPJMN, rasio guru-murid di Indonesia seharusnya sebesar 1 : 29 untuk SD, 1 : 24 untuk SMP, dan 1 : 20 untuk SMA. Pada tahun 2016, rasio guru-murid di Sulawesi Utara 19,33 untuk SD, 14,20 untuk SMP, dan 17,7 untuk SMA. Dari rasio tiap jenjang tersebut menunjukkan bahwa secara umum untuk Sulawesi Utara penambahan tenaga pengajar atau guru belum dapat dijadikan prioritas yang utama.

Isu yang perlu dibahas terkait kebutuhan tenaga pendidik adalah pemerataan guru. Distribusi guru juga hendaknya mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Distribusi guru yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Keberadaan guru yang berlebih menyebabkan beban mengajar seorang guru menjadi terlalu rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam tatap muka. Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru sehingga proses pembelajaran berlangsung tidak efektif.

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, untuk jenjang pendidikan SD rasio Guru-Murid tertinggi berada di Kota Bitung, sebesar 31,75, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 9,33. Untuk jenjang pendidikan SMP, rasio tertinggi berada di Kota Tomohon sebesar 22,33. Sebaliknya yang terendah berada di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 9,81. Pada jenjang pendidikan SMA, rasio tertinggi berada di Kota Kotamobagu sebesar 21,56, sedangkan yang paling rendah berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 12,25.

Keberadaan guru di Sulawesi Utara terlihat tidak merata di Kabupaten/Kota. Gap terbesar berada di jenjang pendidikan SD, tetapi yang paling rendah berada pada jenjang SMA. Tiga Kabupaten



Kepulauan, yaitu Talaud, Sangihe, dan Sitaro yang dirasa kekurangan tenaga pengajar, malah terlihat rasionya rendah. Perbandingan rasio guru-murid dengan target RPJMN menunjukkan bahwa terdapat 2 Kabupaten/Kota yang dianggap kekurangan guru, yaitu Kota Bitung untuk guru SD dan Kota Kotamobagu untuk guru SMA.

3. Alokasi Anggaran Pendidikan

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas tak bisa terlepas dari upaya dan kebijakan pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin setiap warganya dapat memperoleh pendidikan. Pembangunan yang jelas berada pada tangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa membuat Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berisi mengenai otonomi daerah dimana daerah mempunyai hak dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Anggaran mengenai pendidikan ini sudah diatur dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 49 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dengan besaran anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Dari anggaran tersebut, pemerintah menggunakannya untuk mengembangkan pendidikan dan memberikan subsidi biaya pendidikan berupa dana BOS, Kartu Indonesia Pintar, dan yang lainnya.

Total APBD Sulawesi Utara pada tahun 2016 mencapai Rp 2.983.465.695.444. Dan sekitar Rp 88.846.630.810 dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Atau secara persentase, anggaran pendidikan tersebut hanya 2,98 persen dari total APBD Sulawesi Utara. Angka tersebut masih jauh di bawah amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan



Nasional yang menyebutkan besaran anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD.

Anggaran pendidikan ini sangat berperan penting dalam meningkatkan pendidikan. Anggaran pendidikan yang merupakan investasi pendidikan harus terdistribusikan secara merata agar dapat menjangkau semua anak. Namun demikian, definisi merata ini bukan berarti terbagi rata, karena daerah tertinggal, daerah miskin, daerah perdesaan, dan daerah kaum minoritas merupakan sasaran yang paling tepat untuk mendapatkan investasi pendidikan. Selain itu, Mulyani (2016) mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penggenjotan anggaran pendidikan tetapi juga peningkatan kualitas dan hasil pendidikan. Dengan demikian, pemerintah harus dengan bijak menggunakan anggaran tersebut.

4. Sarana prasarana Transportasi

Lalu lintas jalan merupakan salah satu prasarana publik yang berperan penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Mobilitas barang dan orang antar wilayah tentu sangat mengandalkan lalu lintas jalan. Jalan adalah prasarana transportasi yang berperan penting dalam pengembangan fungsi masyarakat dan memajukan kesejahteraannya. Jalan juga mempunyai manfaat bagi suatu wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Dalam UU No. 38 Tahun 2004, jalan berperan sebagai bagian prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan mempunyai fungsi, antara lain untuk memperkokoh kesatuan wilayah sehingga menjangkau daerah terpencil, dan untuk mewujudkan



peri kehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Dengan adanya jalan yang sesuai dengan fungsinya diharapkan akan mencapai kemakmuran rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan keseimbangan antar daerah (PP RI No.34 tahun 2006) (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2006).

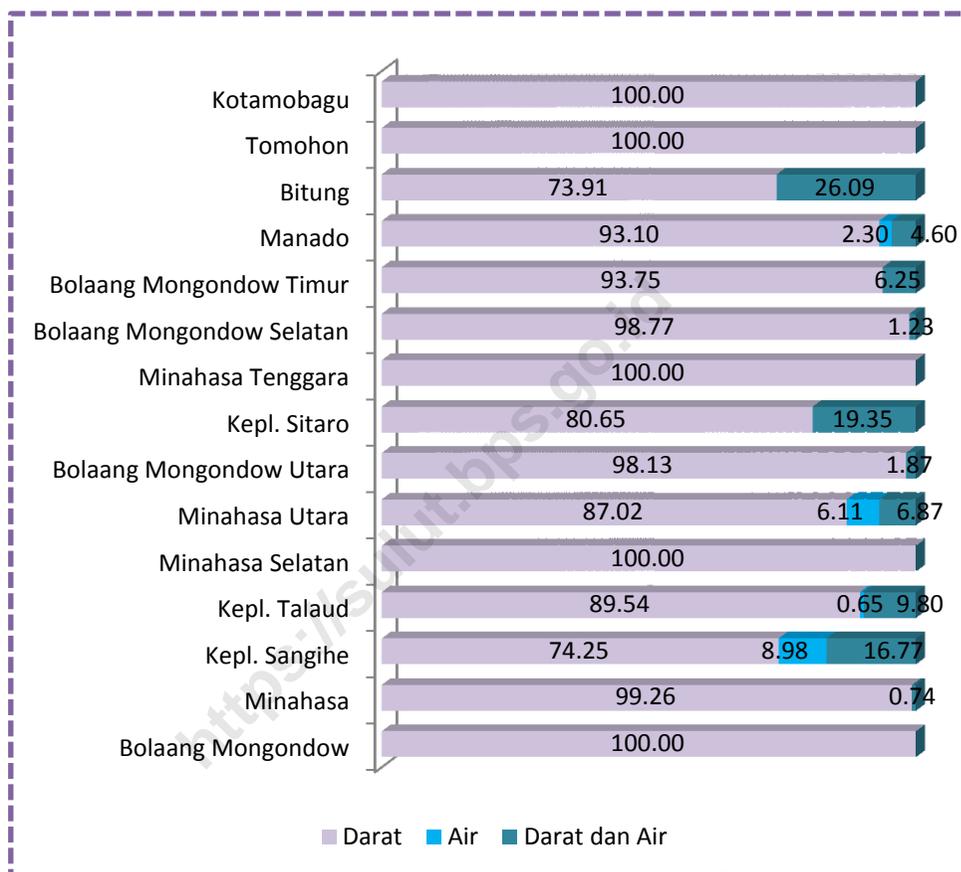
Untuk pembangunan pendidikan, tercapainya pendidikan yang baik tidak hanya didorong oleh kondisi gedung atau tempat pendidikan, tetapi juga akses menuju tempat pendidikan. Akses tersebut adalah kondisi jalan, dimana kondisi jalan yang buruk tentu akan menghambat mobilitas penyaluran barang-barang pendidikan seperti buku pelajaran, terutama untuk mobilitas ke daerah terpencil.

Sekitar 93,03 persen Desa/Kelurahan di Sulawesi Utara dari dan ke desa/kelurahan terdekat dihubungkan oleh jalur darat, kemudian 1,42 persen dihubungkan oleh jalur air saja, dan sisanya 5,56 persen dihubungkan oleh jalur darat dan air. Ada 4 Kabupaten/Kota yang mempunyai desa/kelurahan yang hanya dihubungkan oleh jalur air saja, yaitu Manado (2,30 persen), Minahasa Utara (6,11 persen), Kepulauan Talaud (0,65 persen), dan Kepulauan Sangihe (8,98 persen).

Berdasarkan data PODES Tahun 2014, persentase desa/kelurahan yang dari dan ke desa/kelurahan terdekat dihubungkan oleh jalur darat dengan permukaan aspal/beton adalah 87,18 persen. Angka tersebut membuat Sulawesi Utara menduduki peringkat 8 dengan persentase desa terbesar yang jalan dari dan ke desa/kelurahan terdekat dihubungkan oleh jalur darat dengan permukaan aspal/beton. Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan aspal/beton di Sulawesi Utara sudah merata dan baik. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kepulauan Talaud merupakan wilayah dengan persentase terkecil, yaitu sekitar 64,47 persen, bahkan dengan 2



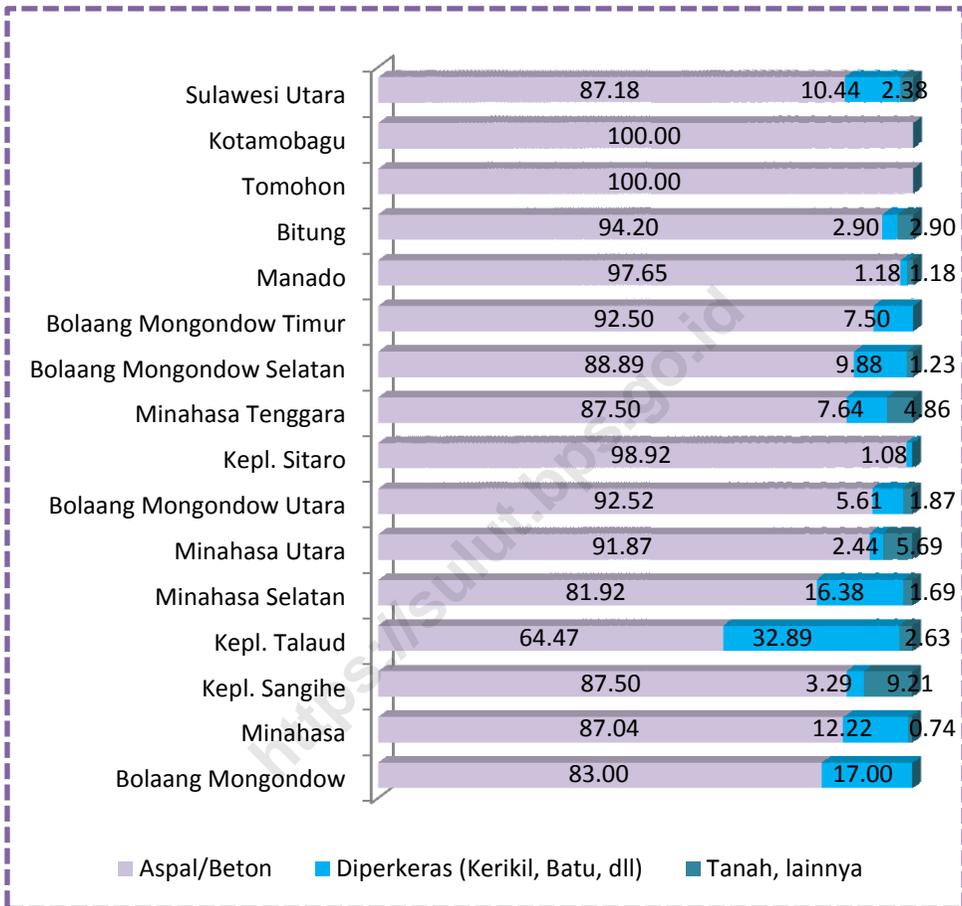
Gambar 2.6. Persentase Desa/Kelurahan menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Kabupaten/Kota, Tahun 2014



Sumber : PODES, 2014



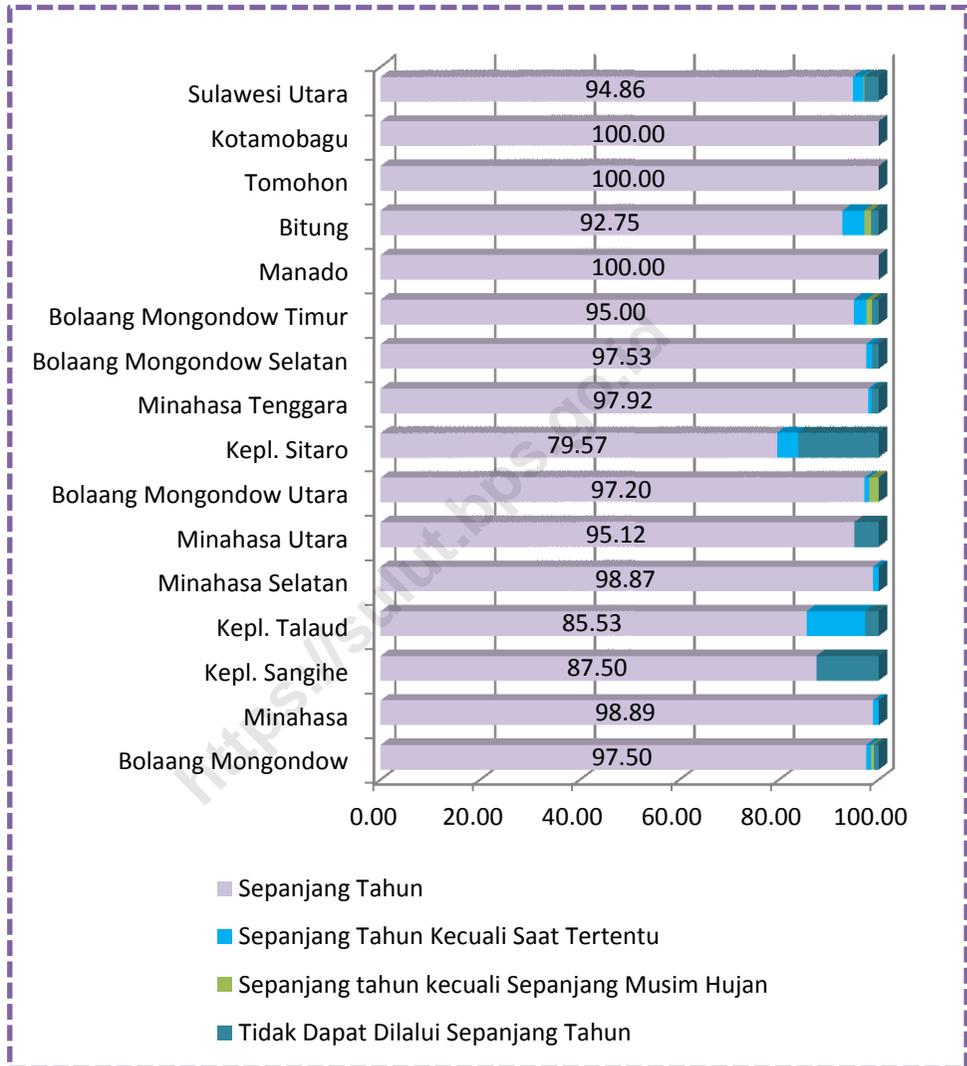
Gambar 2.7. Persentase Desa/Kelurahan menurut Permukaan Jalan Darat dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, Tahun 2014



Sumber : PODES, 2014



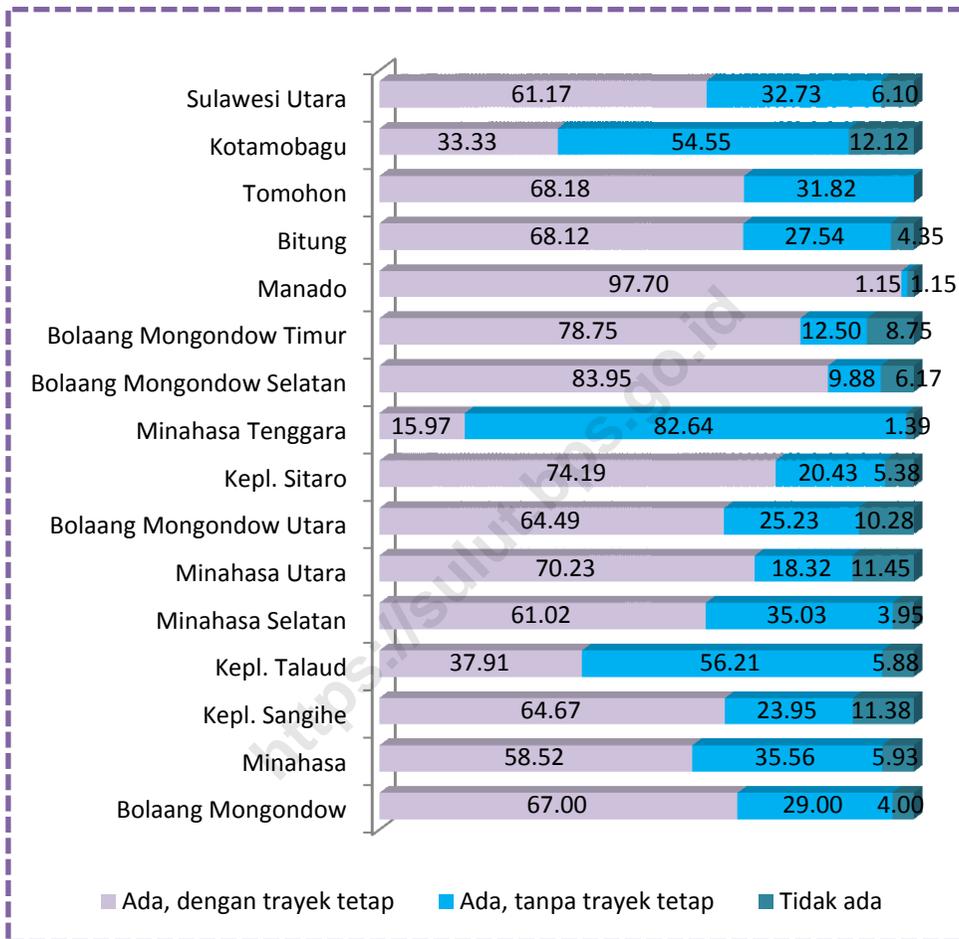
Gambar 2.8. Persentase Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat menurut Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat dan Kabupaten/Kota, Tahun 2014



Sumber : PODES, 2014



Gambar 2.9. Persentase Desa/Kelurahan menurut Ketersediaan Angkutan Umum dan Kabupaten/Kota, Tahun 2014



Sumber : PODES, 2014



kabupaten kepulauan lainnya, Sitaro dan Sangihe, terdapat gap yang cukup besar. Di Kepulauan Sitaro persentasenya sebesar 98,92 persen dan Kepulauan Sangihe sebesar 87,50 persen. Semakin jauh dari pulau Sulawesi, persentase desa/kelurahan yang dari dan ke desa/kelurahan terdekat dihubungkan oleh jalur darat dengan permukaan aspal/beton semakin kecil. Hal tersebut kemungkinan karena semakin sulitnya akses dan semakin mahalnya pembangunan jalan aspal/beton. Selain itu, ada 2 Kabupaten/Kota yang 100 persen jalur darat untuk masuk/keluar desanya mempunyai permukaan aspal/beton, yaitu Tomohon dan Kotamobagu.

Selain kondisi jalan, sarana transportasi juga dibutuhkan untuk mengakses sarana pendidikan. Ketersediaan angkutan umum akan sangat membantu siswa ketika mereka tidak memiliki sarana transportasi sendiri dan harus menempuh perjalanan yang jauh dari tempat tinggal menuju sekolahnya. Angkutan umum juga sangat berperan dalam mobilitas barang dan jasa. Dengan adanya angkutan umum akan mewujudkan moda transportasi dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, angkutan umum juga dapat menunjang pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas daerah.

Berdasarkan data PODES tahun 2014, terdapat 61,17 persen desa di Sulawesi Utara yang sudah memiliki sarana transportasi angkutan umum dengan trayek tetap kemudian 32,73 persen memiliki sarana transportasi angkutan umum tidak bertrayek tetap dan 6,1 persen desa/kelurahan belum memiliki sarana transportasi umum. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka Tomohon merupakan satu-satunya wilayah yang seluruh desanya terdapat sarana angkutan umum, baik dengan trayek tetap (68,18 persen) maupun tidak bertrayek tetap (31,82 persen). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan angkutan umum tersebut harus dilengkapi dengan keadaan lalu lintas yang baik



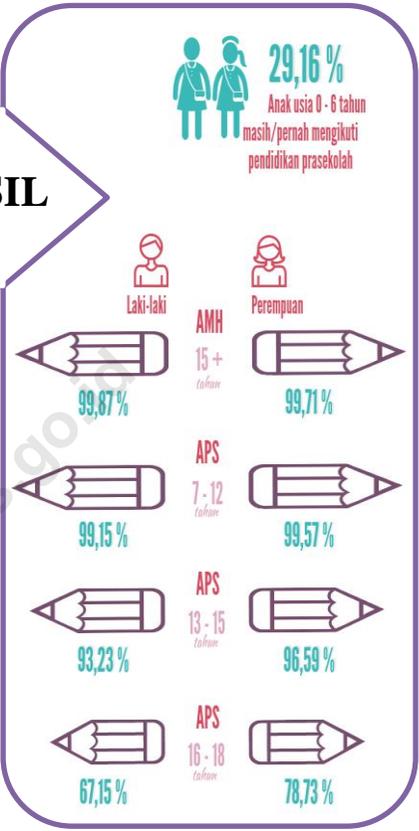
dan dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat, khususnya untuk transportasi darat. Keberadaan desa/kelurahan di Sulawesi Utara sebesar 94,86 persen memiliki prasarana jalan penghubung antar desa yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat sepanjang tahun.

<https://sulut.bps.go.id>



**BAB
III**

**CAPAIAN BIDANG PENDIDIKAN
SULAWESI
UTARA
SEBAGAI HASIL
PEROLEHAN
INVESTASI
DI SEKTOR
PENDIDIKAN**



1. Perkembangan Tingkat Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan pada Bab I, pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa, khususnya daerah Sulawesi Utara. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan penduduk Sulawesi Utara memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya



pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari segi pembelajaran. Selain pembiayaan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sarana prasarana belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah. Di Sulawesi Utara, pembangunan sarana prasarana pendidikan serta pendukungnya telah digambarkan pada Bab II.

Untuk mengetahui capaian pendidikan diperlukan beberapa indikator yang obyektif. Beberapa indikator yang akan disajikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan *Mean Year Schooling* (MYS). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2016 yang dilakukan oleh BPS.

Program Wajib Belajar 9 tahun di Sulawesi Utara belum sepenuhnya berhasil, ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada anak usia 13-15 tahun sebesar 94,89 persen. Dengan kata lain, masih ada 5,02 persen anak usia SMP yang seharusnya bersekolah ternyata sudah berhenti atau putus sekolah. APS menunjukkan persentase anak usia sekolah yang sedang berada di jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar nilai APS semakin berhasil program peningkatan kualitas pendidikan di suatu daerah.

Pada anak usia 7-12 tahun, APS menunjukkan angka yang baik, yaitu 99,36 persen. Pada kelompok usia SLTA (16-18 tahun) APS akan lebih kecil dibandingkan usia SMP, yaitu sekitar 72,57 persen, karena



banyak diantara mereka sudah terjun ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Isu *gender* pada indikator APS Sulawesi Utara cukup menarik. Umumnya di Indonesia ataupun di negara-negara berkembang biasanya anak-anak perempuan ada diskriminasi untuk menikmati pendidikan. Mereka lebih dieksploitasi untuk membantu orang tuanya dalam mengurus urusan rumah tangga ataupun bekerja. Anak laki-laki justru mendapat perhatian lebih dalam hal pendidikan karena dialah yang diharapkan akan mengembalikan investasi sekolah atau dengan kata lain ada anggapan *rate of return* investasi pendidikan pada anak laki-laki lebih besar dibanding perempuan. Di Sulawesi Utara yang terjadi sebaliknya, anak perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding anak laki-laki pada jenjang umur 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Pada jenjang umur 16-18 perbedaannya cukup signifikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK dimungkinkan lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang di luar kelompok usia yang seharusnya. Berdasarkan tabel 3.1, dapat kita lihat bahwa APK Sulawesi Utara pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar adalah sebesar 110,26. Hal itu berarti ada penduduk yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun tetapi sudah/masih bersekolah SD.



Tabel 3.1. Angka Partisipasi Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin, Tahun 2016

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Usia Sekolah (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	99,15	99,57	99,36
13 – 15	93,23	96,59	94,89
16 – 18	67,15	78,73	72,57

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Jenjang	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	111,25	109,22	110,26
SMP	84,49	94,73	89,54
SMA	80,38	87,69	83,80

Angka Partisipasi Murni (APM)

Jenjang	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	94,12	94,11	94,12
SMP	68,96	77,45	73,15
SMA	58,82	66,67	62,50

Sumber : Susenas Maret 2016



APK tidak dapat mengetahui persentase penduduk yang bersekolah tepat usia. Untuk itu diperlukan indikator yang bernama Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2016, APM SD/Sederajat di Sulawesi Utara sebesar 94,12 persen, artinya tidak seluruh anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah, bersekolah pada jenjang SD/ sederajat. Sedangkan APM SMP dan SMA berturut-turut sebesar 73,15 dan 62,50.

Indikator pendidikan yang lain adalah Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Indikator ini dihitung dari penduduk yang berusia 25 tahun ke atas karena mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP, sehingga dapat dibandingkan hingga level dunia. Selain itu dipilih penduduk umur 25 tahun ke atas karena asumsinya pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting sebagai salah satu komponen pembentuk indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Utara tahun 2016 adalah 8,96 tahun. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,08 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Utara baru mampu menempuh pendidikan hingga lulus SMP.



Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kota Manado merupakan wilayah di Sulawesi Utara yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi. Rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Manado sebesar 11,02 tahun, berarti penduduk Manado rata-rata bersekolah hingga kelas 2 SMA. Rata-rata Lama Sekolah yang terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu sebesar 7,3 tahun. Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara tentu kondisi masyarakatnya lebih heterogen dibandingkan daerah lain. Berbagai macam daya tarik yang ada di Manado mengundang penduduk dari wilayah lain untuk bertempat tinggal di kota ini. Masyarakat pendatang ini juga sangat mempengaruhi Rata-rata Lama Sekolah di suatu daerah. Jika masyarakat pendatang banyak yang menamatkan pendidikan tinggi, tentunya Rata-rata Lama Sekolah akan terdongkrak naik. Sebaliknya, jika masyarakat pendatang banyak yang berpendidikan rendah, tentunya akan menekan Rata-rata Lama Sekolah suatu wilayah.

2. Peran Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Prasarana Pendukung terhadap Tingkat Pendidikan

Secara teori sarana prasarana pendidikan dan sarana prasarana pendukung lainnya yang telah dibangun oleh pemerintah Sulawesi Utara dapat menjadi pemicu tingkat pendidikan. Dalam hal ini, tingkat pendidikan dicerminkan oleh salah satu indikator pendidikan, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah/*Mean Year Schooling* (MYS).

Grafik 3.1 sampai dengan 3.3. menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah Sekolah maka MYS semakin tinggi. Semakin banyak sekolah yang dibangun oleh pemerintah memberikan peluang yang semakin tinggi untuk penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan.



Tabel 3.2. Rata-rata Lama Sekolah / *Mean Year Schooling* (MYS) menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014 - 2016

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Bolaang Mongondow	7,13	7,14	7,3
Minahasa	9,53	9,54	9,54
Kep. Sangihe	7,34	7,50	7,7
Kep. Talaud	8,73	8,82	8,92
Minahasa Selatan	8,47	8,70	8,71
Minahasa Utara	9,07	9,23	9,24
Bolaang Mongondow Utara	7,51	7,52	7,67
Kep. Siau Tagulandang Biaro	8,18	8,34	8,45
Minahasa Tenggara	8,37	8,38	8,39
Bolaang Mongondow Selatan	7,68	7,70	7,71
Bolaang Mongondow Timur	7,28	7,38	7,52
Manado	11,01	11,02	11,02
Bitung	9,26	9,28	9,37
Tomohon	10,20	10,22	10,23
Kotamobagu	9,75	9,75	9,97
Sulawesi Utara	8,86	8,88	8,96

Sumber : Susenas Maret 2016



Sama halnya dengan jumlah sekolah, daya tampung sekolah juga berhubungan dengan MYS. Daya tampung sekolah digambarkan oleh rasio Sekolah-Murid. Semakin banyak daya tampung suatu sekolah, MYS juga semakin tinggi.

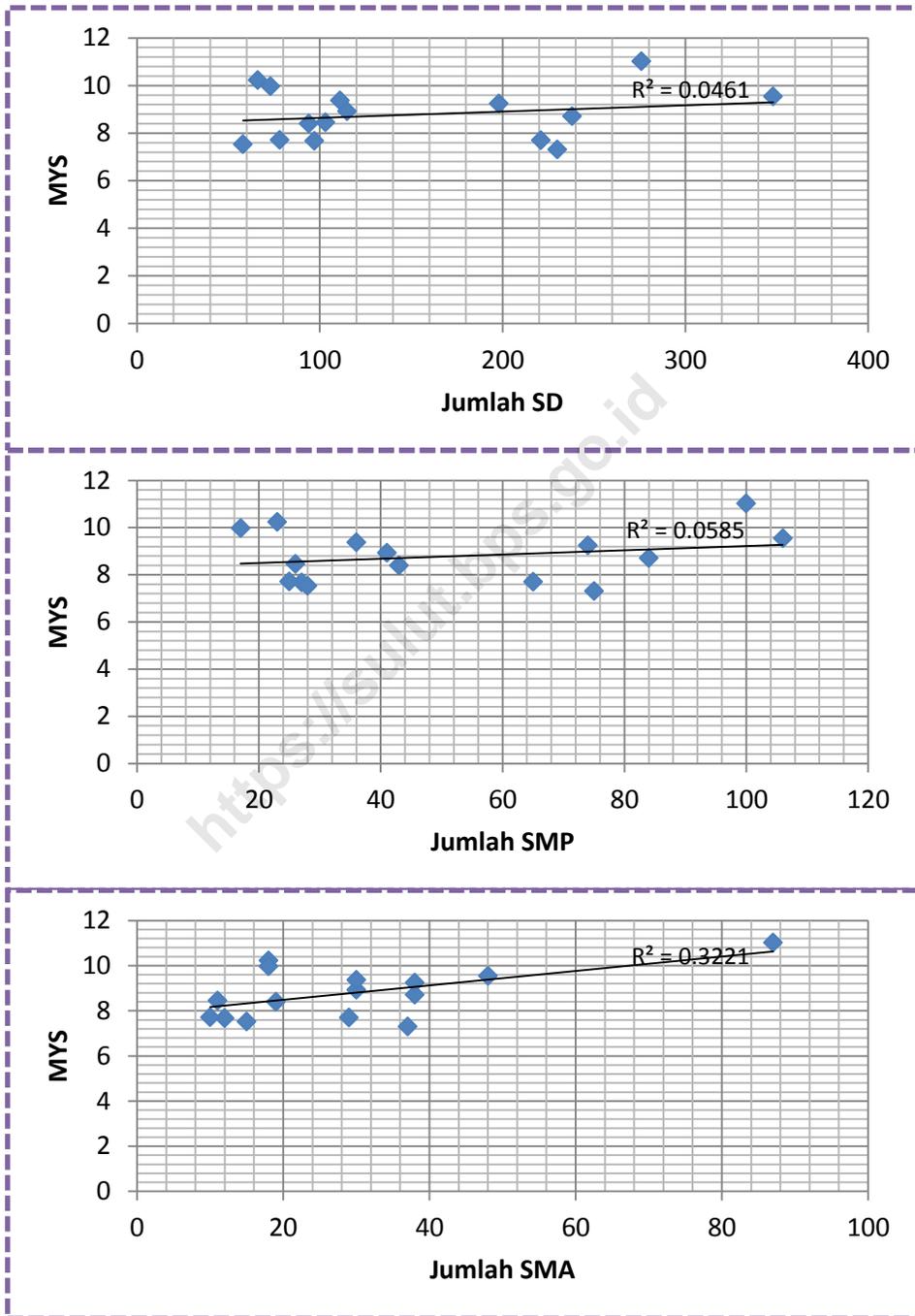
Jika dilihat berdasarkan jenjang sekolahnya, *scatter plot* antara jumlah SMA dan MYS lebih menunjukkan hubungan positif yang paling besar. Artinya, jumlah SMA mempunyai hubungan dengan MYS yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah SMP dan SD. Jika melihat Angka Partisipasi Sekolah usia 16-18 yang hanya 72,57 persen, maka dapat juga dikatakan bahwa kesempatan bersekolah di SMA masih belum terbuka lebar. Jumlah SMA semakin banyak dapat membuka peluang tersebut dan MYS dapat terpacu untuk meningkat, walaupun permasalahannya bukan hanya sekedar ketersediaan SMA. Masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Sulawesi Utara untuk meningkatkan MYS.

Sama halnya dengan jumlah sekolah, daya tampung SMA juga memiliki hubungan positif yang lebih besar dengan MYS dibandingkan dengan daya tampung SD atau SMP. Daya tampung dan jumlah SMA di Sulawesi Utara dapat dijadikan perhatian utama pemerintah dalam melakukan pembangunan gedung sekolah dibandingkan dengan SD dan SMP.

Hubungan antara jumlah guru dengan Rata-rata Lama Sekolah dan rasio guru-murid dengan Rata-rata Lama Sekolah juga menunjukkan pola yang sama dengan hubungan daya tampung sekolah dengan Rata-rata Lama Sekolah. Semakin banyak jumlah guru akan mampu mendongkrak Rata-rata Lama Sekolah. Begitu juga dengan rasio guru-murid. Semakin besar rasio guru-murid juga semakin besar Rata-rata Lama Sekolah, namun perlu diperhatikan juga kapasitas guru mengajar



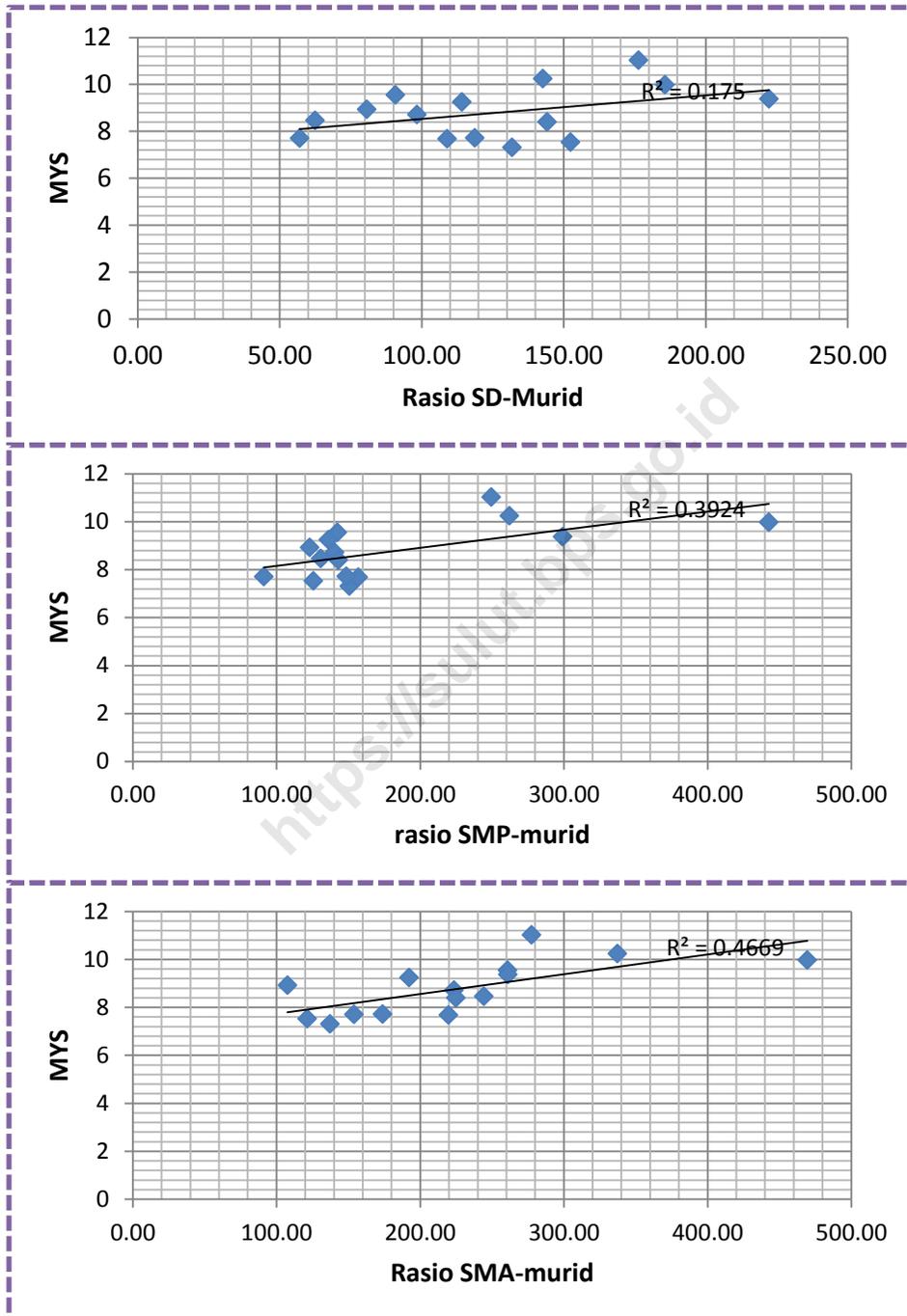
Grafik 3.1. Scatter Plot antara Jumlah Sekolah dengan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : Susenas Maret dan Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016, diolah



Grafik 3.2. Scatter Plot antara Rasio Sekolah-Murid dengan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : Susenas Maret dan Dinas Pendidikan/Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016, diolah



murid yang efektif dan efisien. Seperti yang telah disebutkan di BAB 2, bahwa rasio guru-murid di Indonesia seharusnya sebesar 1 : 29 untuk SD, 1 : 24 untuk SMP, dan 1 : 20 untuk SMA. Rasio guru-murid yang terlalu besar juga akan berdampak kurang tersampainya materi yang diberikan oleh guru ke murid.

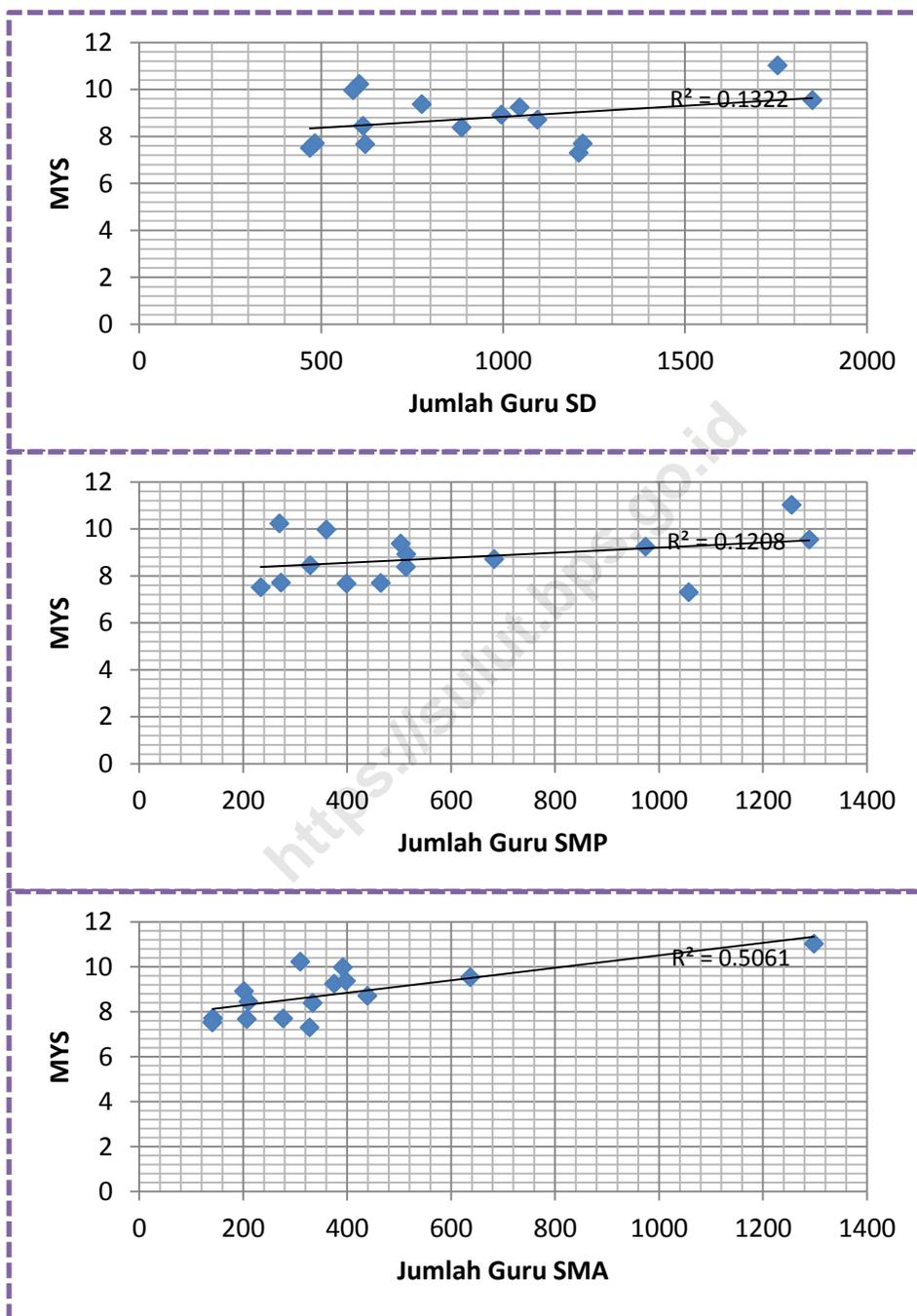
Dari gambar 3.3, dapat diketahui bahwa hubungan jumlah guru dengan Rata-rata Lama Sekolah yang terkuat berada pada jenjang SMA. Artinya penambahan jumlah guru di jenjang SMA lebih berkorelasi dengan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dibandingkan peningkatan jumlah guru SD dan SMP. Hal yang sama juga terlihat pada gambar 3.4, hubungan rasio guru-murid dengan Rata-rata Lama Sekolah terlihat yang paling kuat dibandingkan dengan hubungan jenjang-jenjang di bawahnya, yaitu rasio guru-murid SD dan rasio guru-murid SMP.

Tentunya, bukan hanya sarana/prasarana pendidikan yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Kondisi infrastruktur jalan dan ketersediaan angkutan umum dapat menunjang siswa ataupun guru mengakses sarana belajar. Semakin baik kondisi jalan, maka semakin mudah murid ataupun guru untuk pergi ke sekolah. Dengan kemudahan itu diharapkan tidak mengendorkan semangat murid untuk mengenyam pendidikan.

Secara umum, sarana prasarana penunjang pendidikan seperti kondisi jalan utama desa dan ketersediaan angkutan umum juga berhubungan positif terhadap Rata-rata Lama Sekolah, namun hubungan tersebut relatif kecil. Hubungan paling tinggi ditunjukkan oleh *scatter plot* antara persentase desa yang memiliki jalan beraspal/beton dengan Rata-rata Lama Sekolah. Hal itu menunjukkan bahwa penambahan infrastruktur jalan beraspal akan berhubungan positif



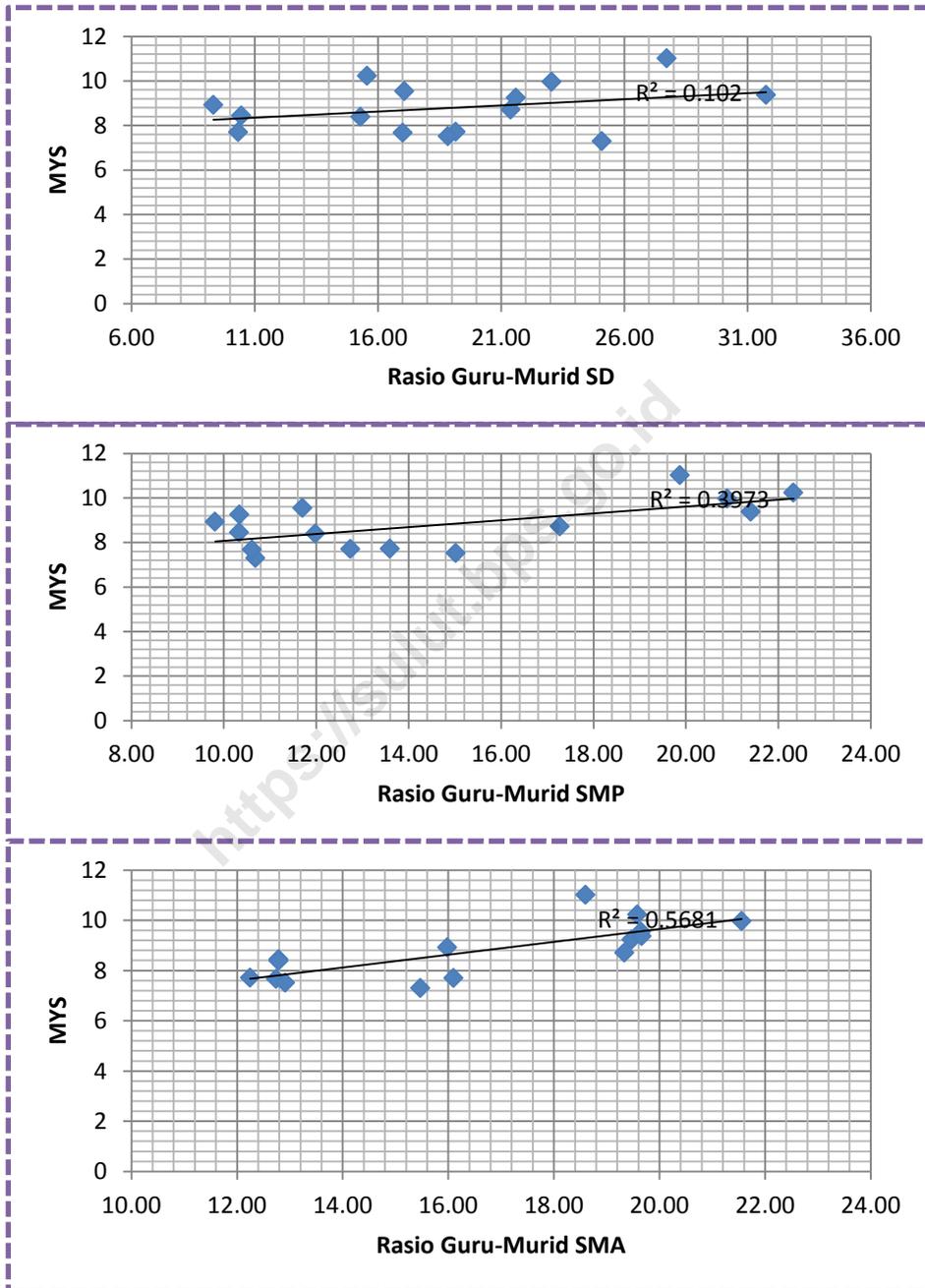
Grafik 3.3. Scatter Plot antara Jumlah Guru dengan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : Susenas Maret dan Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016, diolah



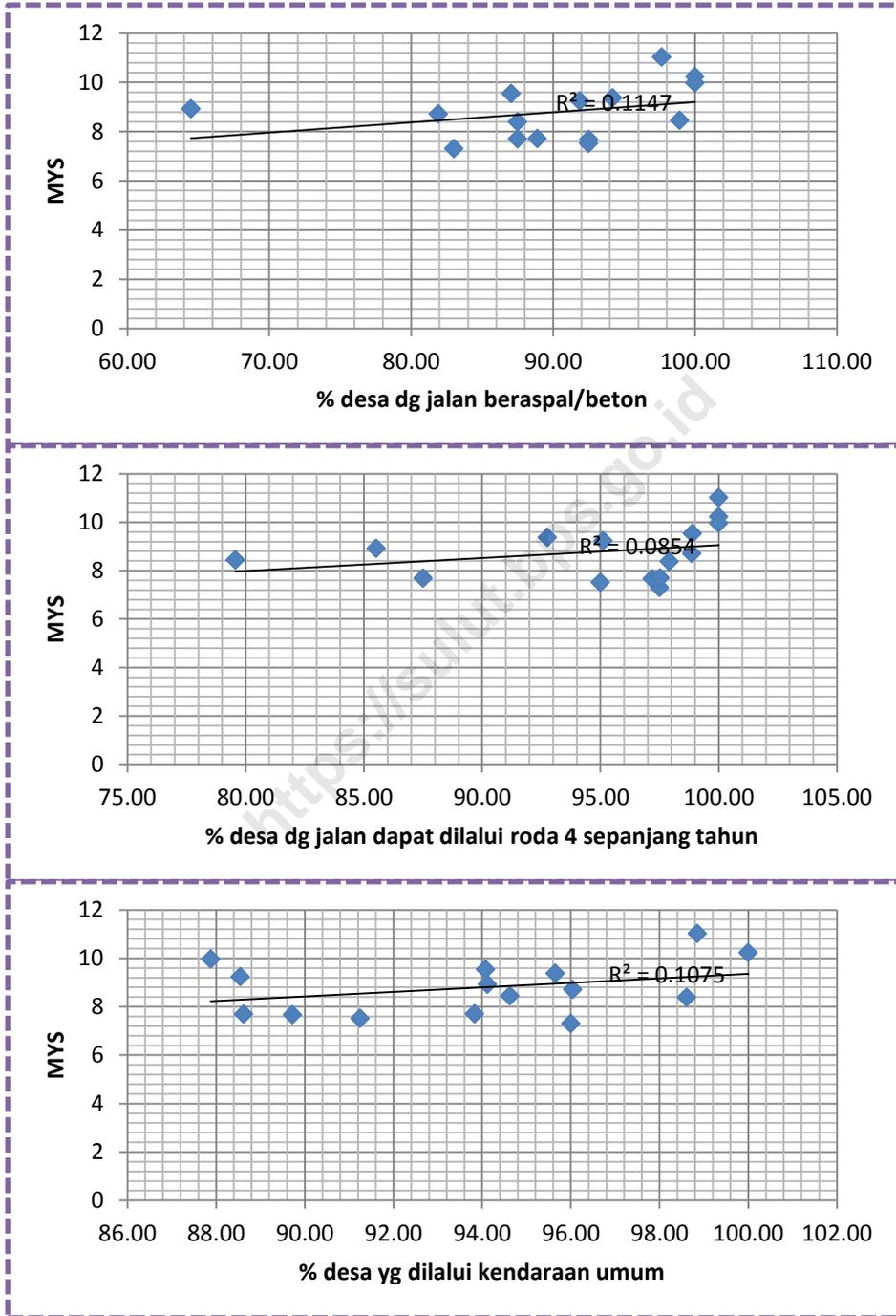
Grafik 3.4. Scatter Plot antara Rasio Guru-Murid dengan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : Susenas Maret dan Dinas Pendidikan/Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2016, diolah



Grafik 3.5. Scatter Plot antara infrastruktur dengan Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber : Susenas Maret 2016 dan PODES 2014



dengan kemudahan murid mengakses sekolah. Pada akhirnya rata-rata lama sekolah juga dapat meningkat. Hubungan antara sarana prasarana penunjang pendidikan dengan Rata-rata Lama Sekolah relatif kecil dimungkinkan oleh angka indikator sarana prasarana tersebut yang sudah relatif tinggi di Sulawesi Utara.

3. Peran Tingkat Pendidikan Terhadap Perekonomian Masyarakat

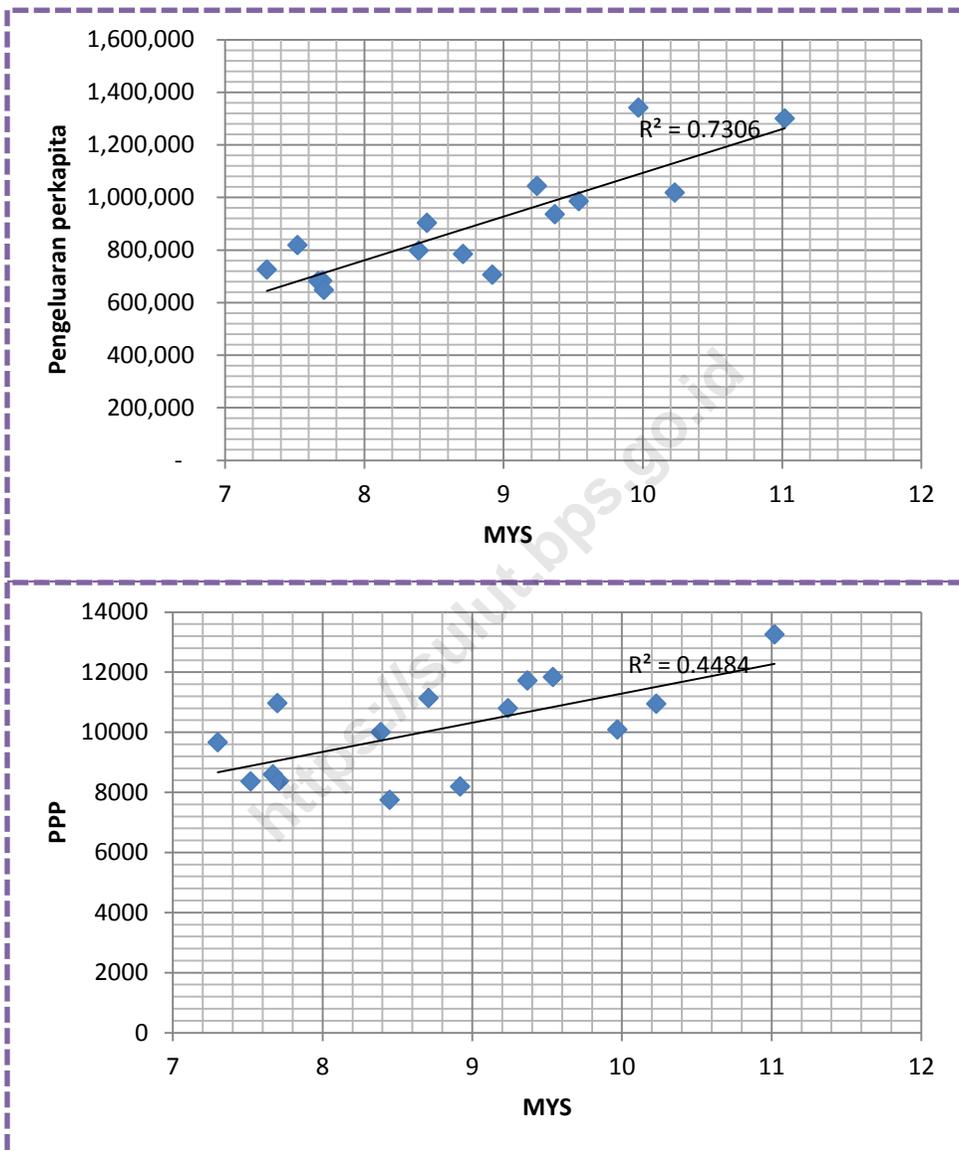
Sumber daya manusia yang berpendidikan merupakan modal utama pembangunan suatu daerah, salah satunya adalah perkembangan ekonomi. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi, maka semakin mudah pula suatu pemerintah daerah membangun provinsinya.

Schultz (1954) dan Becker (1993) menyatakan bahwa nilai keuntungan investasi pendidikan merupakan aktualisasi dari nilai produktifitas marginal seseorang. Intinya, investasi pemerintah Sulawesi Utara di bidang pendidikan akan mampu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula produktifitasnya, pada akhirnya masyarakat semakin sejahtera.

Analisis ini akan membandingkan tingkat pendidikan dengan tingkat perekonomian penduduk. Tingkat pendidikan diwakili oleh rata-rata lama sekolah. Sedangkan tingkat perekonomian penduduk diwakili oleh pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Pada gambar 3.5 nampak bahwa rata-rata lama sekolah berhubungan kuat dengan pengeluaran perkapita penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula pengeluaran perkapita penduduk. Pengeluaran perkapita ini akan disetarakan dengan pendapatan. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan



Grafik 3.6. Hubungan antara Rata-Rata Lama Sekolah dengan Tingkat Perekonomian Masyarakat



Sumber : Susenas Maret 2016



semakin tinggi pula pendapatan masyarakat. Demikian halnya pada grafik hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan PPP. Dapat dilihat bahwa ada hubungan positif antara rata-rata lama sekolah dengan daya beli masyarakat.

<https://sulut.bps.go.id>



<https://sulut.bps.go.id>



BAB IV

PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA

Bab sebelumnya menggambarkan capaian indikator kesejahteraan rakyat di bidang pendidikan, sarana prasarana pendidikan yang berhubungan dengan tingkat pendidikan dan seberapa kuat hubungannya, dan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat perekonomian masyarakat. Semua yang dibahas berkaitan dengan pendidikan. Selain pendidikan, masih ada beberapa sudut pandang lain dari indikator kesejahteraan rakyat, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan.

1. Kependudukan

Masalah kependudukan meliputi jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik, tetapi sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan bila kualitasnya rendah. Kualitas penduduk dapat

Pengeluaran
Penduduk Solut
2016

Rp 957.458

Non Makanan



Rp 472.520

Makanan



Rp 484.938

Artinya,



Jika dalam 1 rumah tangga terdapat 3 anggota (ayah, ibu, dan anak), maka pengeluaran 1 rumah tangga tersebut adalah :

Rp 2.872.375

ditingkatkan dengan peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan, kesehatan yang layak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk berkaitan erat dengan laju pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, otomatis akan meningkatkan jumlah penduduk secara pesat. Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada daerah yang belum maju dapat menimbulkan permasalahan. Pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban perekonomian secara makro dan menjadi beban rumah tangga secara mikro. Sementara itu, pertumbuhan penduduk tinggi yang disumbangkan oleh penambahan jumlah penduduk usia muda yang produktif biasanya karena faktor banyaknya migrasi pencari kerja yang masuk juga tentu akan menimbulkan masalah sosial baru di suatu daerah.

Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2010 – 2035, jumlah penduduk Sulawesi Utara sebanyak 2,44 juta jiwa tahun 2016. Jumlah penduduk Sulawesi Utara mengalami kenaikan sebanyak 24,8 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2015, sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah penduduk Sulawesi Utara meningkat sebanyak 159,23 ribu jiwa, sekitar 6,99 persen.

Wilayah perkotaan dengan segala fasilitas, ketersediaan lapangan kerja, kemudahan akses, dan kelengkapan infrastrukturnya menjadi daya Tarik bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Kota Manado menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk paling banyak di Sulawesi Utara, yaitu sebanyak 427,9 ribu jiwa. Penduduk yang paling sedikit adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu 63,2 ribu jiwa.



Tabel 4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara

Tahun	Jumlah Penduduk (juta)	Laju pertumbuhan
(1)	(2)	(3)
2010	2,28	
		1,24
2011	2,31	
		1,20
2012	2,33	
		1,15
2013	2,36	
		1,11
2014	2,39	
		1,07
2015	2,41	
		1,03
2016	2,44	

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS



Semenjak tahun 2010 hingga 2016, secara absolut jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya relatif mengalami penurunan. Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara dibawah 2 persen, tergolong cukup kecil dibandingkan daerah lain atau rata-rata nasional. Penurunan laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana yang ditujukan untuk menekan angka kelahiran, menciptakan norma keluarga kecil sehingga terbuka peluang bagi suatu keluarga untuk meningkatkan kualitas keluarganya. Laju Pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara Tahun 2011 terhadap 2010 sebesar 1,24. Angka tersebut terus mengecil hingga tahun 2016 terhadap 2015 yang sebesar 1,03.

Adanya jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Sulawesi Utara perlu mendapat perhatian yang serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergi dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 terhadap 2015 yang paling kecil. Laju pertumbuhan penduduk Sangihe adalah 0,34 persen, kurang dari separuh angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk yang paling tinggi berada di Kota Kotamobagu sebesar 1,9 persen, hampir 2 kali laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara. Kota Manado yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup kecil, yaitu sebesar 0,53 persen.

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara menurut Kabupaten/Kota ada *range* sebesar 1,56 persen. Hal itu mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Sulawesi Utara



tidaklah homogen. Adanya disparitas tersebut, memungkinkan adanya perbedaan kebijakan kependudukan pula di Sulawesi Utara. Laju pertumbuhan penduduk yang besar tidak serta-merta menjadikan jumlah penduduk yang besar pula. Sebagai contoh, laju pertumbuhan Kota Manado terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan Kota Kotamobagu, tetapi jika dilihat angka absolutnya, baik Kota Manado maupun Kotamobagu sama-sama bertambah 2,27 ribu jiwa. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk di Kota Manado yang memang sudah banyak. Sehingga laju pertumbuhan penduduk yang sedikitpun mampu menambah penduduk yang relatif banyak.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Sulawesi Utara mempunyai *sex ratio* sebesar 104,19, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 104-105 penduduk laki-laki. Dapat juga dikatakan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Kabupaten dengan *sex ratio* tertinggi adalah Bolaang Mongondow Timur, yaitu 109,18. Jika melihat *sex ratio* menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro adalah satu-satunya wilayah di Sulawesi Utara yang *sex ratio*-nya di bawah 100. Hal itu menandakan bahwa di Kepl. Siau Tagulandang Biaro penduduk perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Persoalan kependudukan lain yang dihadapi adalah ketimpangan distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Di sisi lain, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan dengan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya jumlah lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk permukiman, serta tidak



Tabel 4.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kode	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk per Km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Bolaang Mongondow	3.021,60	236.893	78.40
02	Minahasa	1.188,69	332.190	279.46
03	Kep. Sangihe	597,13	130.024	217.75
04	Kep. Talaud	1.014,74	89.836	88.53
05	Minahasa Selatan	1.478,47	206.603	139.74
06	Minahasa Utara	985,24	199.498	202.49
07	Bolaang Mongondow Utara	1.935,53	77.383	39.98
08	Kep. Siau Tagulandang Biaro	218,18	65.827	301.71
09	Minahasa Tenggara	709,28	105.163	148.27
10	Bolaang Mongondow Selatan	1.798,29	63.207	35.15
11	Bolaaang Mongondow Timur	904,16	69.716	77.11
71	Manado	166,87	427.906	2,564.31
72	Bitung	330,17	208.995	632.99
73	Tomohon	147,11	101.981	693.23
74	Kotamobagu	48,91	121.699	2,488.22
Sulawesi Utara		14.544,37	2.436.921	167,55

Sumber: Sulawesi Utara dalam Angka 2016



memadainya akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta masalah sosial lainnya.

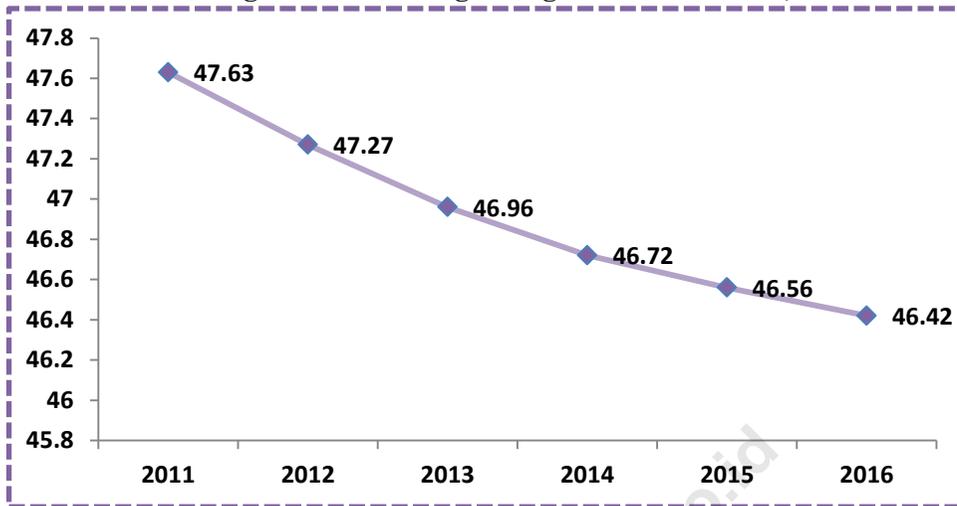
Kepadatan penduduk di Sulawesi Utara sebesar 167,55, artinya terdapat 167 sampai 168 jiwa di setiap km². Daerah Kota di Sulawesi Utara menempati 4 teratas Kabupaten/Kota yang penduduknya terpadat. Daerah yang terpadat penduduknya adalah Kota Manado, dimana setiap Km² dihuni sekitar 2,56 ribu jiwa. Terpadat kedua adalah Kota Kotamobagu, yaitu setiap Km² dihuni sekitar 2,49 ribu jiwa.

Indikator kependudukan lain yang menarik untuk dibahas adalah angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase angka beban ketergantungan semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum/tidak produktif.

Pada tahun 2016 angka beban ketergantungan sebesar 46,42, berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 46 sampai 47 penduduk usia belum/tidak produktif, menurun jika dibandingkan tahun 2015. Hal ini dapat menjadi sinyal yang baik untuk pemerintah setempat memaksimalkan penduduk usia kerja. Bila proporsi penduduk usia belum/tidak produktif semakin rendah (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) maka angka beban ketergantungan akan semakin rendah. Semakin rendah angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk

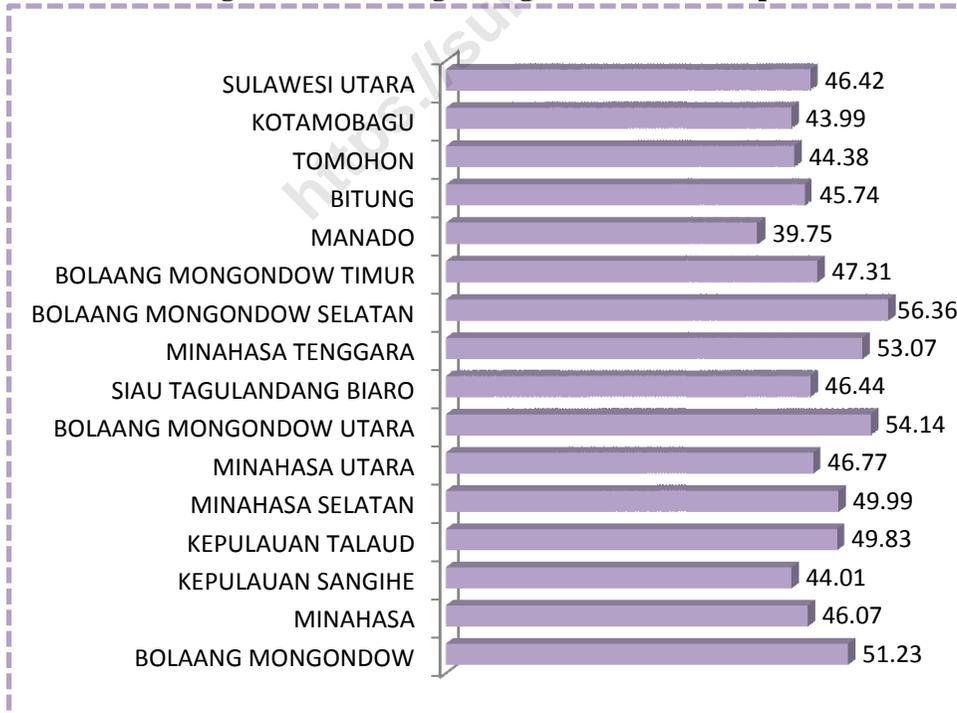


Gambar 4.1 Angka Beban Ketergantungan Sulawesi Utara, 2011-2016



Sumber: Proyeksi Penduduk

Gambar 4.2 Angka Beban Ketergantungan menurut Kabupaten/Kota, 2016



Sumber: Proyeksi Penduduk



meningkatkan kualitas dirinya dan keturunannya dengan adanya investasi *human capital* maupun *saving*.

Tren angka beban ketergantungan 2011-2016 Sulawesi Utara terlihat ke arah penurunan dari 47,63 di tahun 2011 menjadi 46,42 di tahun 2016. Angka beban ketergantungan di bawah 50 merupakan indikasi bahwa suatu daerah masih berada pada periode jendela peluang (*windows of opportunity*). Pada periode pendek tersebut diperoleh adanya bonus demografi yakni keuntungan ekonomis akibat adanya peningkatan proporsi penduduk usia produktif sehingga setiap 100 penduduk usia produktif hanya menanggung 50 penduduk usia tidak produktif atau perbandingannya hanya setengahnya. Ilustrasinya, dalam suatu rumah tangga terdapat 2 anggota rumah tangga usia produktif (misalnya ayah dan ibu) dan satu anggota rumah tangga yang tidak produktif, anak dibawah 15 tahun misalnya. Bayangkan jika terdapat kesempatan kerja yang juga cukup untuk menampung mereka, maka akan terjadi kelebihan kemampuan memenuhi kebutuhannya sehingga ada kemampuan bagi rumah tangga untuk melakukan *saving* atau melakukan investasi *human capital* yang lebih tinggi baik bagi kedua orang tua pada ilustrasi tadi ataupun bagi anaknya. Investasi *human capital* misalnya dengan menyekolahkan pada jenjang yang lebih tinggi, ataupun meningkatkan kemampuan tambahan misalnya melalui kursus dan lain-lain.

Bila diamati berdasarkan kabupaten/kota, tampak 4 kabupaten yang angka beban ketergantungannya berada di atas 50. Kabupaten tersebut adalah Bolaang Mongondow (51,23), Bolaang Mongondow Utara (54,14), Minahasa Tenggara (53,07), dan Bolaang Mongondow Selatan (56,36). Kabupaten Kepulauan Talaud dan Minahasa Selatan baru memasuki *windows of opportunity* di tahun 2016. Sebelumnya, tahun 2015, angka beban ketergantungan di dua kabupaten tersebut



berturut-turut adalah 50,03 dan 50,14. Angka beban ketergantungan tertinggi di Sulawesi Utara berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan yang terendah adalah Kota Manado, yaitu 39,75.

Di atas telah disinggung bahwa laju pertumbuhan penduduk semakin mengecil. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor demografi, yaitu tingkat kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (migrasi). Perpindahan atau migrasi dibagi menjadi migrasi masuk dan migrasi keluar. Tingkat fertilitas merupakan faktor demografi yang menentukan penurunan tingkat pertumbuhan penduduk. Penundaan usia perkawinan dan program KB pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas, karena memperpendek masa reproduksi mereka.

Usia perkawinan pertama seorang wanita berpengaruh terhadap resiko melahirkan. Semakin muda usia perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi selama masa kehamilan/melahirkan, baik keselamatan ibu maupun anak, karena belum matangnya rahim wanita muda untuk proses berkembangnya janin atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Hasil Susenas menunjukkan terdapat sekitar 52,24 persen wanita umur 10 tahun ke atas yang menikah pada usia di bawah 21 tahun di Sulawesi Utara tahun 2016. Angka itu meningkat cukup tajam, setelah di tahun sebelumnya persentasenya sekitar 35,5 persen. Perkawinan di bawah 21 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan. Semakin muda usia kawin pertama yang dilakukan seseorang, maka akan semakin lama pula masa reproduksinya. Hal ini



**Tabel 4.3 Wanita Usia 15-49 tahun Pengguna Alat/Cara KB (persen),
2015 - 2016**

Alat/Cara Kontrasepsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi	2,21	2,54
MOP/Vasektomi	0,20	0,33
AKDR/IUD/Spiral	5,86	6,49
Suntikan	47,12	51,03
Implan/Susuk	16,69	15,49
Pil	26,46	21,93
Kondom/Karet	0,27	0,65
Intravag/Kondom Wanita	0,07	0,09
Cara Tradisional	1,13	1,44
% Wanita yang sedang menggunakan alat/cara KB	66,67	62,65

Sumber: Susenas Maret 2016



berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah.

Pengendalian angka kelahiran juga dapat dilakukan dengan program Keluarga Berencana. Program KB merupakan salah satu program pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi yang berbagai jenis macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan instansi pemerintah yang menangani program KB ini. BKKBN mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD dan Implan. Dengan cakupan KB yang semakin meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk lebih dapat dikendalikan lagi. Berdasarkan hasil Susenas, persentase wanita yang berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dan sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2016 mencapai 62,65 persen. Sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 66,67 persen, namun tidak signifikan.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi 2, yaitu sementara dan permanen. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, keterjangkauan harga, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efektif, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping



terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunaannya.

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Badan Pusat Statistik memotret bahwa di tahun 2016 suntikan dan pil merupakan dua alat kontrasepsi yang paling diminati oleh wanita umur 15-49 tahun yang pernah kawin. Kondisi ini masih sama dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2016, ada 51,03 persen dari mereka adalah pengguna alat KB suntik, sementara 21,93 persen adalah pemakai pil KB. Terjadi pergeseran alat/cara KB dari Pil di tahun 2015 menjadi suntikan di tahun 2016. Di sisi lain, terdapat 1 dari 100 wanita di rentang usia tersebut yang masih menggunakan KB cara tradisional.

2. Kesehatan dan Gizi

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Morbiditas atau angka kesakitan penduduk dan rata-rata lama sakit atau lamanya terganggu aktifitas sehari-hari adalah salah satu indikator yang mampu memberikan gambaran kesehatan penduduk.



Semakin kecil angka morbiditas dan rata-rata lama sakit berarti semakin baik penanganan keluhan kesehatan di suatu daerah. Merujuk pada konsep Badan Pusat Statistik, morbiditas menunjukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya.

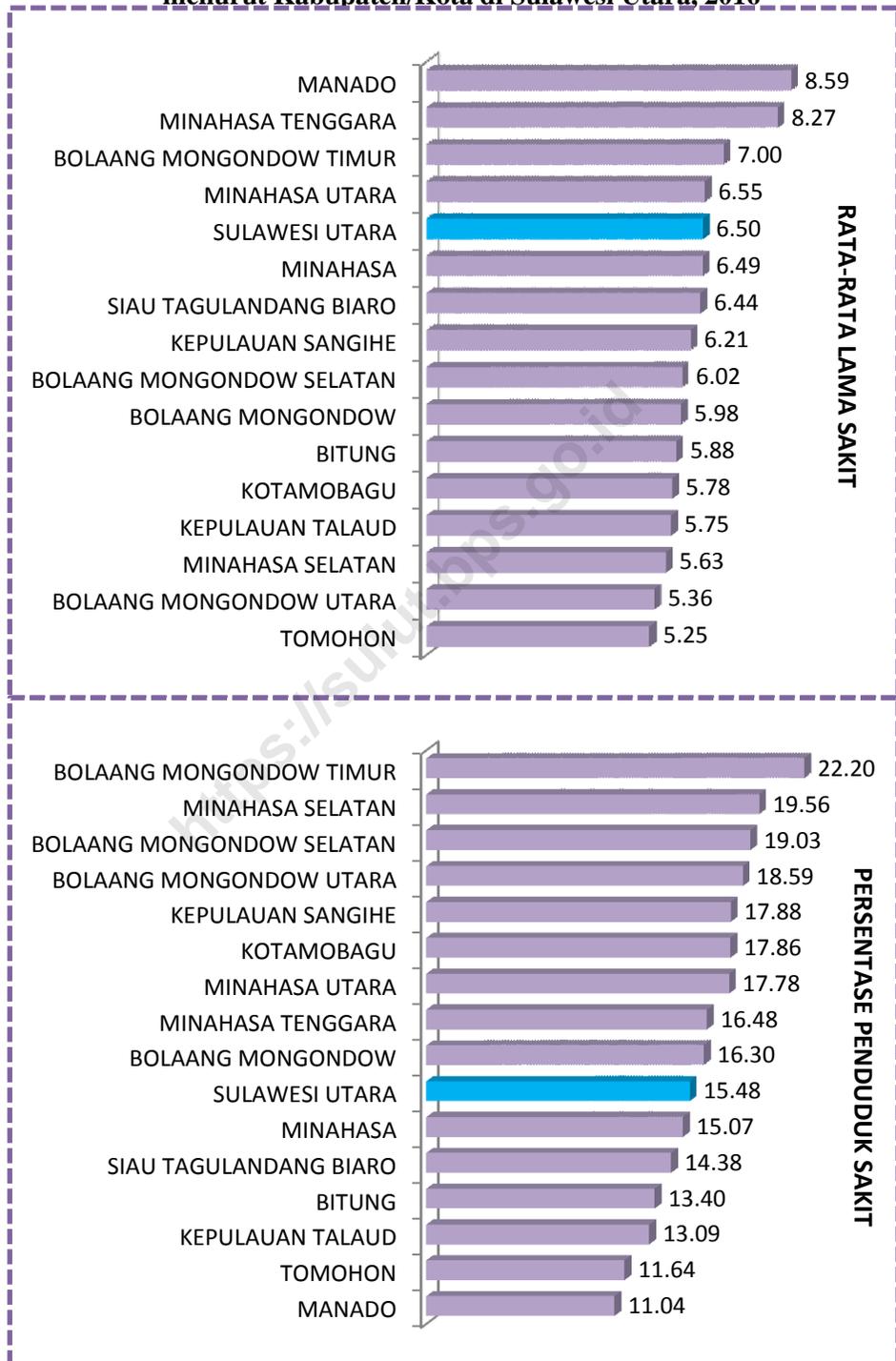
Pada tahun 2016, angka kesakitan (morbiditas) di Sulawesi Utara mencapai 15,5 persen. Hal ini berarti sekitar 15 hingga 16 dari 100 orang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan wilayah yang mempunyai angka kesakitan tertinggi di Sulawesi Utara pada tahun 2016, yaitu mencapai 22,2 persen. Tingkat morbiditas terendah ada di Kota Manado sebesar 11,04 persen.

Rata-rata lamanya seseorang terganggu karena sakitnya mengalami kenaikan yang tidak signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu dari 6,24 hari menjadi 6,5 hari. Bila dilihat per kabupaten/kota, Kota Tomohon memiliki rata-rata lama sakit terpendek yaitu 5,25 hari. Sedangkan Kota Manado memiliki rata-rata lama sakit terpanjang yaitu 8,59.

Status kesehatan penduduk juga dapat dilihat dari gizi dan imunitas balita. Setelah anak lahir, Air Susu Ibu (ASI) dianjurkan supaya diberikan hingga anak berusia 2 tahun. ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Semakin lama bayi mendapatkan ASI, kekebalan/proteksi tubuh bayi akan lebih kuat. Pemerintah mencanangkan pemberian ASI eksklusif untuk anak hingga 6 bulan, setelah itu anak diberikan makanan pendamping ASI dan terus diberi ASI hingga usia 2 tahun.



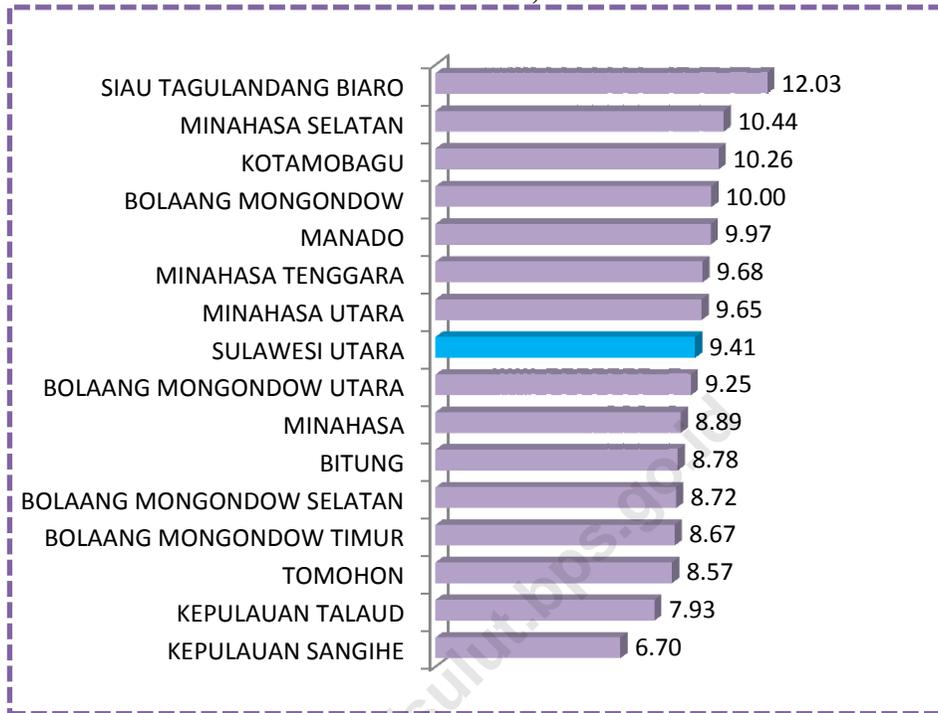
Gambar 4.3 Rata-rata Lama Sakit dan Persentase Penduduk Sakit menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

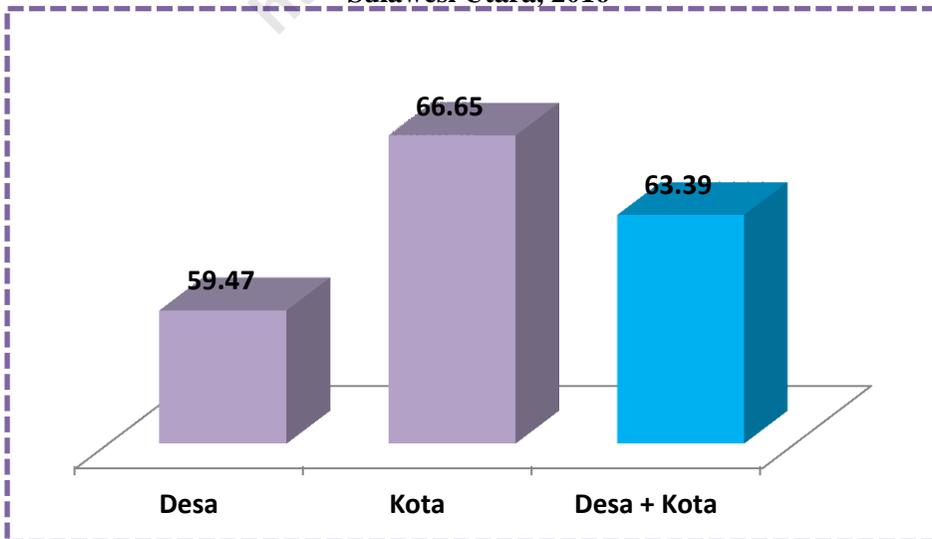


Gambar 4.4 Rata-rata Lama Pemberian ASI menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

Gambar 4.5 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap di Sulawesi Utara, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016



Gambar 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata seorang anak disusui oleh ibunya di Sulawesi Utara sebesar 9,41. Artinya, lama anak diberi ASI oleh ibunya antara 9 sampai dengan 10 bulan. Sisi positifnya adalah konsep pemberian ASI 6 bulan pertama sudah terlampaui. Di seluruh kabupaten/kota pun kondisinya serupa, bahkan di Kep. Siau Tagulandang Biaro balita diberi ASI oleh ibunya selama 12 bulan. Sisi negatifnya, rata-rata lama menyusui masih jauh dari standar maksimal, yaitu 24 bulan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap suatu penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang memperoleh imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

Sekitar 63,39 persen balita Sulawesi Utara sudah diimunisasi lengkap. Di Pulau Sulawesi, angka tersebut merupakan yang terbesar kedua setelah Gorontalo (66,65 persen). Balita di wilayah perkotaan lebih banyak yang mendapatkan imunisasi lengkap dibandingkan wilayah perdesaan. *Gap*nya cukup signifikan yakni mencapai 7,18 persen.

Indikator kesehatan yang terakhir diulas adalah mengenai gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator penolong persalinan bayi dan jenis pengobatan yang dilakukan. Dalam hal tenaga persalinan, masyarakat Sulawesi Utara umumnya sudah memiliki preferensi untuk menggunakan tenaga kesehatan/medis. Hampir 100 persen bayi yang



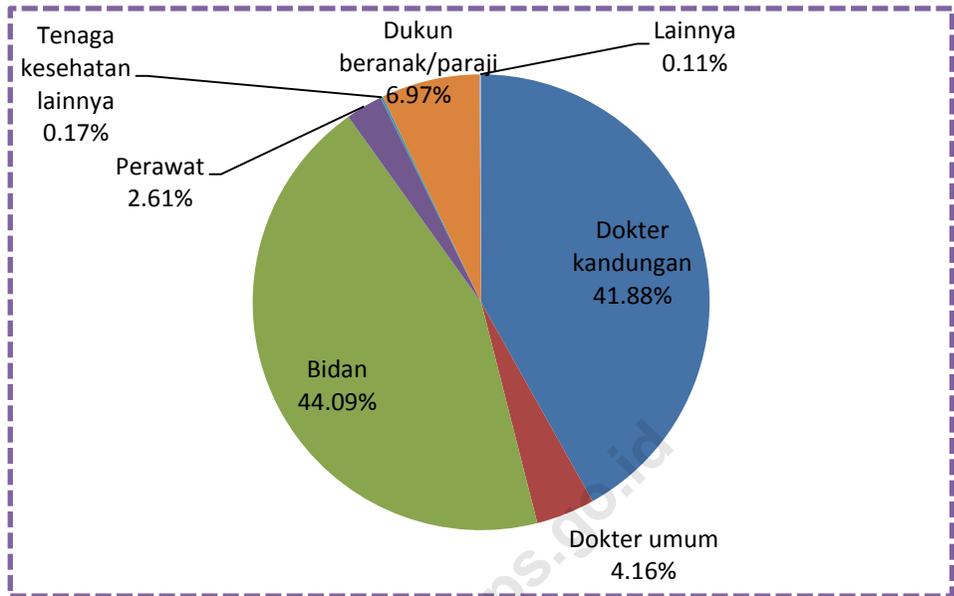
lahir ditolong oleh tenaga kesehatan/medis. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terdidik dan terlatih akan meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi. Persentase penolong persalinan oleh tenaga kesehatan idealnya terus meningkat dari tahun ke tahun, karena hal tersebut terkait erat dengan kelangsungan hidup ibu dan bayi yang dilahirkannya. Dari beberapa pilihan tenaga medis, hampir lima puluh persen masyarakat lebih memilih ditolong oleh bidan pada saat persalinan. Selain karena bidan merupakan tenaga yang dilatih khusus untuk menolong persalinan, bidan juga mudah dijangkau sejak adanya program bidan desa. Di perkotaan pun bidan mudah dijangkau karena di setiap Puskesmas tersedia tenaga bidan.

Di sisi lain, masih ada 6,97 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga dukun bayi. Gambaran ini lebih umum terjadi di wilayah perdesaan. Manakala bidan sulit didapat maka dukun menjadi pilihan lain, terutama bagi desa-desa yang jauh dari jangkauan puskesmas. Dengan kondisi demikian eksistensi dukun bayi tetap strategis. Program pemerintah tidak mutlak hanya dengan menambah tenaga medis tetapi juga tetap diperlukan peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi mengingat eksistensi mereka tadi.

Selain bidan, preferensi masyarakat Sulawesi Utara untuk memilih dokter dalam hal penolong persalinan juga cukup banyak yakni sekitar 41,88 persen, hampir menyamai persentase bidan. Masyarakat perkotaan lebih memilih dokter dibanding tenaga medis lain apalagi dukun bayi. Kemudahan mendapatkan pelayanan dokter di perkotaan menjadikan masyarakat lebih memilih dokter. Bidan biasanya tersedia di rumah bersalin dan puskesmas. Rumah sakit yang ditangani oleh dokter



Gambar 4.6 Komposisi Penolong Persalinan Bayi di Sulawesi Utara, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

Tabel 4.4 Penduduk yang Berobat Jalan berdasarkan Lokasi Berobat dan Klasifikasi Wilayah (persen), 2016

Lokasi Berobat	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	9,29	7,86	8,43
Rumah Sakit Swasta	7,42	3,94	5,34
Praktek Dokter/Bidan	41,95	46,32	44,56
Klinik/Praktek Dokter Bersama	9,27	5,27	6,88
Puskesmas/Pustu	30,13	36,98	34,23
UKBM *)	1,66	2,20	1,98
Praktek Pengobatan Tradisional	3,02	1,59	2,16
Lainnya	1,42	1,59	1,52

Sumber: Susenas Maret 2016

*) terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan



biasanya menjadi pilihan utama bagi masyarakat perkotaan untuk melakukan proses persalinan.

Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota maka terdapat tiga daerah yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat, yaitu Bolaang Mongondow Selatan, Kepl. Sangihe dan Kepl. Talaud. Daerah-daerah tersebut memerlukan perhatian yang cukup serius terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di 3 daerah tersebut, penolong persalinan oleh tenaga non-kesehatan masih cukup tinggi. Sekitar 47 dari 100 wanita bersalin di Bolaang Mongondow Selatan lebih memilih ditolong oleh tenaga non-kesehatan. Demikian halnya di Kepl. Sangihe dan Kepl. Talaud, sekitar 20 dari 100 wanita bersalin lebih memilih ditolong oleh tenaga non-kesehatan.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Dari informasi tersebut dapat teridentifikasi berbagai masalah yang dihadapi penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan layanan kesehatan.

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Tampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dan penduduk di perkotaan yang dapat disebabkan oleh ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas kesehatan tersebut, ditambah perilaku penduduk itu sendiri.



Dalam hal tempat berobat bagi penduduk yang berobat jalan, yang paling menonjol pada tahun 2016 adalah penduduk yang berobat ke praktek dokter (44,56 persen) dan puskesmas/pustu (34,23 persen). Preferensi masyarakat daerah perkotaan pun berbeda dengan masyarakat perdesaan. Penduduk perkotaan yang berobat jalan ke rumah sakit relatif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hampir 17 persen penduduk perkotaan lebih memilih berobat jalan ke rumah sakit, sementara di perdesaan hanya kurang dari 12 persen. Sekitar 46 persen penduduk perdesaan lebih memilih berobat jalan ke praktek dokter/bidan, sementara di perkotaan hanya sekitar 42 persen.

3. Taraf dan Pola Konsumsi

Data pengeluaran konsumsi yang terekam dalam Susenas terdiri atas dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan/permintaan terhadap kedua kelompok tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, kita akan mendahulukan pemenuhan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Dengan kata lain, persentase pengeluaran bukan makanan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk.

Pergeseran komposisi dan pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan



relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan/investasi. Uraian tersebut menjelaskan bahwa pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, sedangkan pergeseran komposisi pengeluaran dapat mengindikasikan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp 820.426 menjadi Rp 957.458 selama periode 2015-2016. Bila dilihat persentasenya, pengeluaran untuk makanan menurun dari 51,96 persen menjadi 50,65 persen. Sebaliknya, persentase pengeluaran untuk non makanan mengalami kenaikan dari 48,04 persen menjadi 49,35 persen. Hal ini merupakan indikasi dini adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak signifikan mengalami peningkatan. Peningkatan persentase pada kelompok bukan makanan hampir merata di semua sub kelompok non makanan kecuali pengeluaran untuk pajak dan keperluan pesta. Peningkatan yang paling tinggi ada pada pengeluaran aneka barang dan jasa, dari 8,76 persen menjadi 12,69 persen. Persentase pengeluaran untuk pajak dan keperluan pesta mengalami penurunan.

Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi



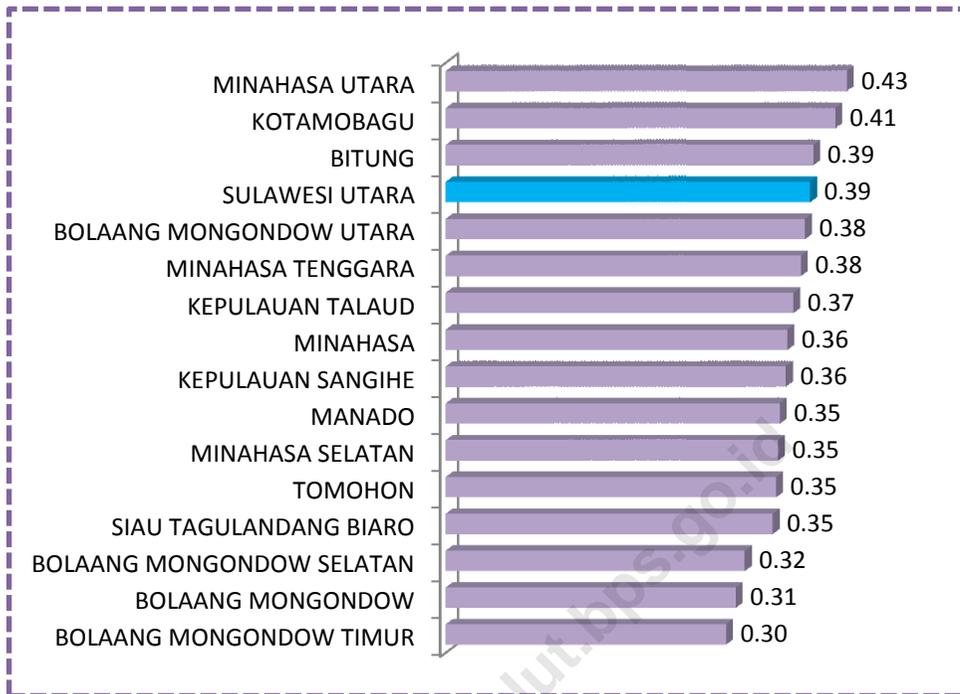
Tabel 4.5 Rata-rata Pengeluaran Perkapita menurut Jenis Pengeluaran, 2015 – 2016

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		Persentase (%)	
	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	426.278	484.938	51,96	50,65
Non Makanan	394.149	472.520	48,04	49,35
Perumahan	205.488	242.367	25,05	25,31
Barang dan Jasa	71.899	121.458	8,76	12,69
Pakaian dan Alas Kaki	16.928	34.845	2,06	3,64
Barang Tahan Lama	14.378	38.557	1,75	4,03
Pajak dan Asuransi	27.299	14.946	3,33	1,56
Keperluan Pesta	29.309	20.347	3,57	2,13

Sumber: Susenas Maret 2016

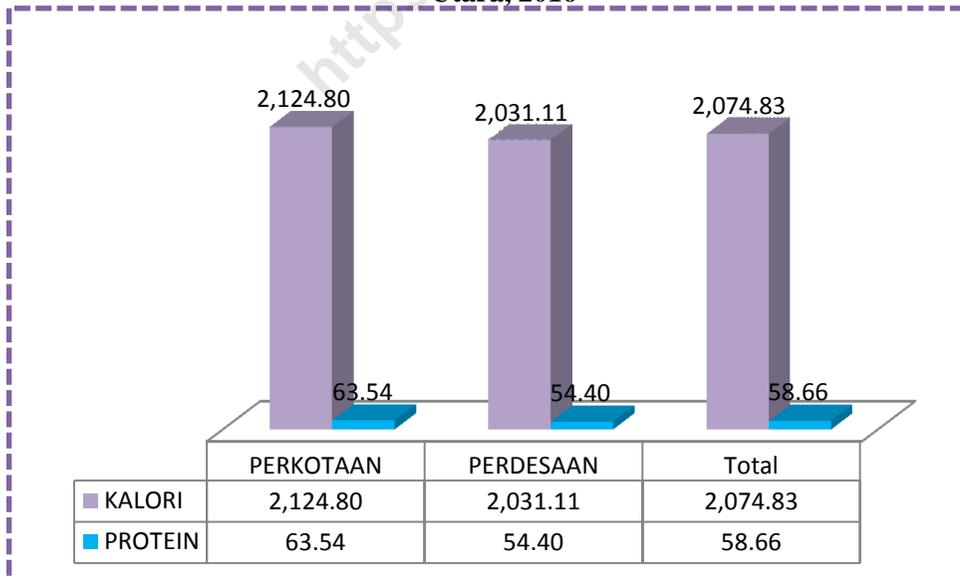


Gambar 4.7 Gini Ratio menurut Kabupaten/Kota, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016

Gambar 4.8 Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Sulawesi Utara, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016



pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan, yaitu mendekati pendapatan dengan pengeluaran. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak pendekatan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah indeks gini atau *gini ratio*.

Indeks gini Sulawesi Utara Maret 2016 sebesar 0,39, artinya ketimpangan pendapatan penduduk di Sulawesi Utara masih dalam tingkat yang sedang. Semakin tinggi indeks gini, maka semakin timpang pendapatan antar penduduk. Penduduk kaya makin kaya, penduduk miskin makin miskin.

Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, *gini ratio* yang paling rendah berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sedangkan yang paling tinggi berada di Kabupaten Minahasa Utara. *Gini ratio* Kabupaten Minahasa utara sebesar 0,41. Namun demikian, dengan *gini ratio* sebesar itu masih masuk kategori ketimpangan sedang.

Konsumsi makanan penduduk akan memberikan asupan gizi. Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata



kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Pada tahun 2016 energi yang dikonsumsi penduduk Sulawesi Utara belum memenuhi angka kecukupan energi yang ditetapkan yaitu 2.150 kkal per hari. Penduduk Sulawesi Utara baru mengkonsumsi kalori sekitar 2.074,83 kkal per hari. Sedangkan untuk konsumsi protein, penduduk Sulawesi Utara sudah melampaui angka kecukupan protein yang ditetapkan, sebesar 57 gram per hari. Penduduk Sulawesi Utara sudah mengkonsumsi protein sebesar 58,66 gram per hari. Nampak juga bahwa baik konsumsi kalori maupun protein penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Konsumsi kalori dan protein penduduk perkotaan masing-masing sebesar 2.124,80 kkal dan 63,54 gram per hari. Konsumsi kalori dan protein penduduk perdesaan masing-masing sebesar 2.031,11 kkal dan 54,40 gram per hari.

4. Perumahan dan Lingkungan

Sepanjang kehidupannya, manusia selalu membutuhkan rumah yang merupakan salah satu kebutuhan pokok hidupnya selain sandang dan pangan untuk mempertahankan diri dari keganasan alam. Dengan kata lain, rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia, maka manusia akan sulit untuk hidup secara layak. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan lainnya, sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu pemukiman rumah penduduk.



Tabel 4.6 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Perumahan, 2015 – 2016

Indikator	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Lantai Tanah (persen)	4,82	3,82
Atap Layak (persen)	97,88	98,27
Dinding Permanen (persen)	94,43	96,03
Rata-rata luas lantai perkapita (m ²)	21,11	22,08

Sumber: Susenas Maret 2016

Tabel 4.7 Rumahtangga menurut Indikator Kualitas Fasilitas Perumahan, 2016

Indikator	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Air Layak	83,53	58,52	70,22
Sanitasi Layak	82,58	67,88	74,75
Sumber Penerangan Listrik	99,68	99,09	99,36

Sumber: Susenas Maret 2016



Manusia membutuhkan rumah disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung dari hujan maupun panas, rumah juga diperlukan untuk memberi rasa aman penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah menjadi tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator bagi kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin sejahtera rumahtangga yang menempati rumah tersebut. Berbagai fasilitas yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan tersebut antara lain dapat dilihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar rumahtangga dan juga tempat penampungan kotoran terakhir.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Tabel 4.6 memberi gambaran bahwa terlepas dari kepemilikan, sebagian masyarakat Sulawesi Utara tinggal di rumah yang kualitasnya cukup baik, yaitu beratap layak, berdinding permanen dan berlantai bukan tanah.

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Luas lantai perkapita juga digunakan untuk mengukur apakah suatu rumah merupakan perumahan yang layak huni atau tidak. SDG's menetapkan standar luas lantai perkapita menjadi salah satu indikator rumah kumuh. Rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari $7,2 \text{ m}^2$ masuk dalam salah satu kriteria rumah tidak layak huni. Kriteria rumah tidak layak



huni tidak hanya dilihat dari luas lantai perkapita, oleh sebab itu tidak dapat serta merta menyatakan rumah tangga dengan luas lantai perkapita kurang dari $7,2 \text{ m}^2$ masuk dalam kategori menempati rumah kumuh. Dengan mengadopsi standar SDG's tersebut, masih terdapat sekitar 12,8 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai perkapita kurang $7,2 \text{ m}^2$ di Sulawesi Utara pada tahun 2016. Tabel 4.6 juga memberi gambaran bahwa masyarakat Sulawesi Utara umumnya menempati luas lantai perkapita yang sudah layak, jauh di atas standar tidak layak, rata-rata seorang penduduk menguasai lantai rumah sekitar $22,08 \text{ m}^2$.

Selain luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Rumah tangga dengan jenis lantai keramik atau marmer mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada rumahtangga yang mempunyai jenis lantai semen, ubin atau tanah. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan bagi jenis penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit. Berdasarkan data Susenas 2016, masih sekitar 3,8 persen rumahtangga di Sulawesi Utara yang berlantaikan tanah. Semakin rendah persentase rumahtangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tangga dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) dan dinding permanen. Mayoritas masyarakat di Sulawesi Utara tinggal di rumah yang beratap seng. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 98,27



persen rumah tangga tinggal di rumah yang beratap layak dan 96,03 persen rumahtangga rumahnya berdinding permanen.

Selain kualitas perumahan, kualitas fasilitas yang ada di perumahan juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air layak sanitasi yang layak. Pada tahun 2016, sekitar 70 persen rumahtangga di Sulawesi Utara dapat mengakses air layak. Rumah tangga di daerah perkotaan lebih banyak mengkonsumsi air layak dibandingkan dengan rumah tangga pedesaan. Ada dua kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang mayoritas penduduknya masih sulit mengakses minum bersih. Hanya kurang dari 41 persen penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan kurang dari 50 persen penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat mengakses air layak.

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggungjawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan sanitasi yang layak. Di Sulawesi Utara, pada tahun 2016 terdapat sekitar 74,75 persen rumahtangga yang memiliki sanitasi yang layak.

Nampak juga di perkotaan lebih banyak rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak dibandingkan di pedesaan. Sekitar 82,58



persen rumah tangga di daerah perkotaan menggunakan sanitasi layak, sedangkan di pedesaan hanya sekitar 67,88 persen.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil susenas 2016, hampir semua rumah tangga di Sulawesi Utara sudah menikmati fasilitas listrik. Tidak tampak secara signifikan perbedaan rumah tangga perkotaan dan pedesaan, artinya distribusi listrik di Sulawesi Utara sudah hampir merata. Dari sudut pandang Kabupaten/Kota, masih ada 5 persen rumah tangga di Kabupaten Kepl. Sangihe yang belum mengkonsumsi listrik.

Indikator kualitas rumah dan fasilitas rumah dapat membentuk indikator lainnya, yaitu Rumah Layak Huni. Terdapat 94,28 persen rumah tangga di Sulawesi Utara menempati rumah yang layak huni. Sebaliknya, masih ada sekitar 5,72 persen yang menempati rumah tidak layak huni dan rawan layak huni.

Indikator perumahan lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup disini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.



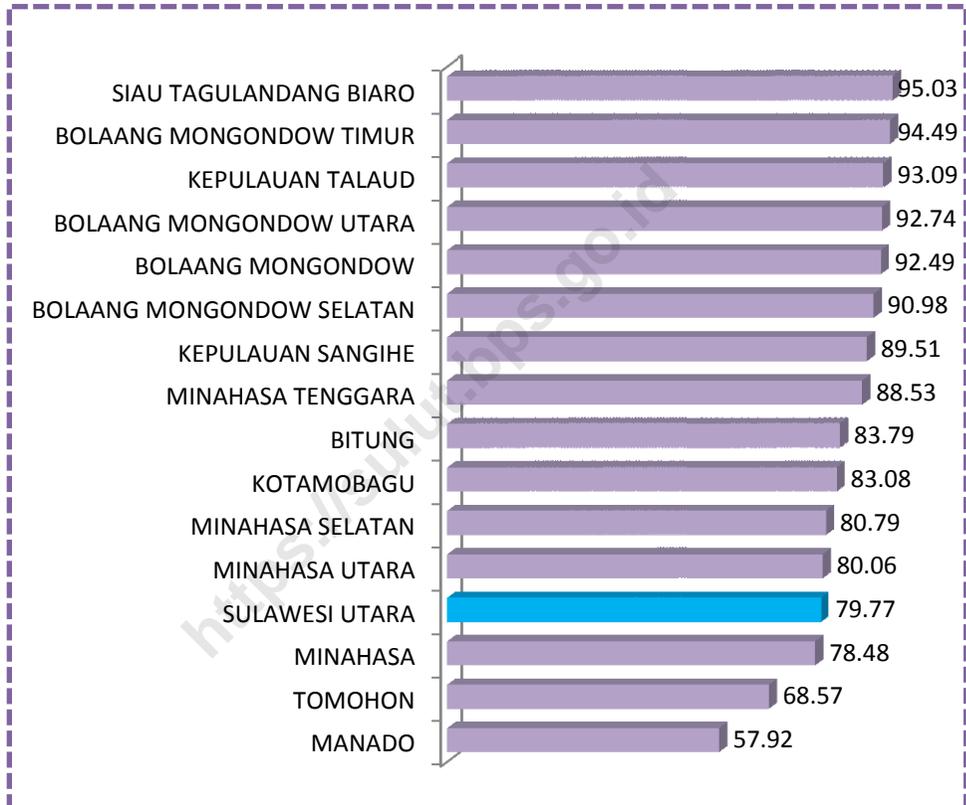
Tabel 4.8 Persentase Rumah tangga menurut Kelayakan Huni Perumahan dan Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Kelayakan Huni			
	Tidak Layak Huni	Rawan Layak Huni	Layak Huni	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Bolaang Mongondow	0,45	10,29	89,26	100,00
02 Minahasa	1,04	4,04	94,92	100,00
03 Kep, Sangihe	3,18	8,23	88,59	100,00
04 Kep, Talaud	0,29	7,92	91,79	100,00
05 Minahasa Selatan	0,00	5,32	94,68	100,00
06 Minahasa Utara	1,13	5,96	92,91	100,00
07 Bolaang Mongondow Utara	1,33	16,20	82,48	100,00
08 Kep, Siau Tagulandang Biaro	0,50	0,74	98,76	100,00
09 Minahasa Tenggara	0,17	4,38	95,45	100,00
10 Bolaang Mongondow Selatan	0,54	16,51	82,94	100,00
11 Bolaang Mongondow Timur	0,00	5,30	94,70	100,00
71 Manado	0,17	2,25	97,58	100,00
72 Bitung	0,00	2,05	97,95	100,00
73 Tomohon	0,00	0,53	99,47	100,00
74 Kotamobagu	0,00	1,56	98,44	100,00
Sulawesi Utara	0,57	5,15	94,28	100,00

Sumber: Susenas Maret 2016



Gambar 4.9 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Rumah Sendiri di Sulawesi Utara, 2016



Sumber: Susenas Maret 2016



Sekitar 79,77 persen rumah tangga di Sulawesi Utara menempati rumahnya sendiri. Sisanya menempati rumah kontrak, sewa, rumah dinas, rumah bebas sewa, dan lainnya. Dari gambar 4.9 terlihat bahwa rumah tangga di Kota Manado yang menempati rumahnya sendiri memiliki persentase terendah dibandingkan kab/kota lainnya (57,92 persen). Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah karena lebih banyaknya pendatang di Kota Manado dibandingkan kab/kota lainnya. Sedangkan Bolaang Mongondow Timur dan Kepl. Siau Tagulandang Biaro hampir semua penduduknya menempati rumah milik sendiri.

Penduduk perdesaan lebih banyak menempati rumah milik sendiri dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Hanya sekitar 70,33 persen rumah tangga di wilayah perkotaan yang menempati rumah milik sendiri, sementara lebih dari 88,06 persen penduduk di perdesaan menempati rumah milik sendiri. Rumah kontrakan atau kos lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Kemungkinan lain adalah mengenai lahan di daerah perkotaan sedikit untuk membangun rumah. Kalaupun ada, harganya lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Sehingga penduduk yang belum memiliki rumah lebih memutuskan untuk menempati rumah kontrak, sewa, atau bebas sewa.

5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.



Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan MDGs, yang kemudian berubah menjadi SDGs mulai tahun 2016. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat.

Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah seberapa jauh *gap* atau perbedaan antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan (P1) dan seberapa besar variasi pendapatan antar penduduk miskin (P2). Tentunya, semakin kecil indikator-indikator tersebut menandakan bahwa program pengentasan kemiskinan di suatu wilayah berhasil. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai.

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas yang utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mengurangi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Sulawesi Utara masih berada di bawah angka nasional. Artinya, Sulawesi Utara bukan merupakan penyumbang tingginya angka kemiskinan nasional. Tentunya hal itu mengindikasikan keberhasilan pemerintah



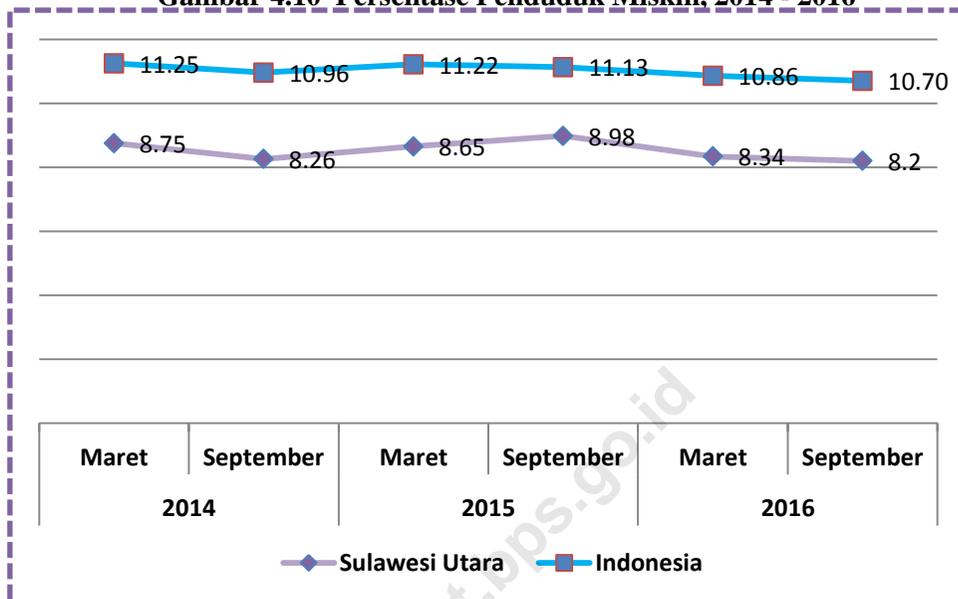
Sulawesi Utara selama 3 tahun terakhir. Hal lain yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengoreksi adalah tren kemiskinan Sulawesi Utara selama 3 tahun terakhir. Tren tersebut terlihat menurun, dari 8,75 persen pada Maret 2014 menjadi 8,2 persen pada September 2016.

Pada september tahun 2016, penduduk miskin Sulawesi Utara banyak yang terkonsentrasi di pedesaan. Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 10,82 persen, sementara di perkotaan hanya 5,22 persen. Rendahnya angka kemiskinan di perkotaan merupakan pencapaian yang cukup baik, karena menurunkan angka kemiskinan membutuhkan upaya yang keras dari berbagai pihak.

Membahas kemiskinan tidak hanya sekedar mengenai persentase penduduk miskin (P0). Tetapi ada variabel lain yang juga berkaitan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (P2). Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan berkurangnya penurunan pada P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.



Gambar 4.10 Persentase Penduduk Miskin, 2014 - 2016



Sumber: Susenas

Tabel 4.9 Perkembangan Kemiskinan menurut Indikator di Sulawesi Utara, 2015 - 2016

Indikator	2015		2016	
	Maret	September	Maret	September
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,34	1,54	1,53	1,38
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,34	0,44	0,46	0,34
Garis Kemiskinan (Rp)	295.365	307.104	317.478	318.984

Sumber: Susenas



Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga perlu memperhatikan jarak terhadap batas miskin (tingkat kedalaman kemiskinan) dan ketimpangan antar penduduk miskin (tingkat keparahan kemiskinan). Oleh karena itu, selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Selama periode 2015-2016 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami kenaikan. Sedangkan Indeks Keparahannya mengalami tren yang relative datar. Pergerakan Indeks kedalaman kemiskinan meningkat, hal itu mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin besar. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,34 di Maret 2015 menjadi 1,38 di September 2016, walaupun tidak terlalu signifikan.

Indeks kedalaman daerah perkotaan pada September 2016 (0,79) lebih kecil dibandingkan perdesaan (1,89), artinya penduduk miskin di perdesaan memiliki *gap* yang lebih besar dengan garis kemiskinan. *Gap* yang lebih besar tersebut menyebabkan membutuhkan usaha yang lebih juga untuk memperkecil *gap* tersebut.

Sama halnya dengan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan di perkotaan juga lebih kecil dibandingkan dengan angka perdesaan. Di perdesaan, pendapatan penduduk miskin lebih bervariasi. Indeks keparahan kemiskinan di wilayah perkotaan periode September 2016 tercatat sebesar 0,19, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 0,46.



DAFTAR PUSATAKA

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta :
Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2016*. Jakarta :
Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.2017. *Sulawesi Utara Dalam
Angka 2017*. Manado : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi
Utara
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.2017. *Statistik Kesejahteraan
Rakyat Provinsi Sulawesi Utara 2016*. Manado : Badan Pusat
Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.2016. *Indikator Statistik
Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara 2015*. Manado :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Potensi Desa Provinsi Sulawesi Utara
2014*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Budiarti, Nenden.2010. *Analisis Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Bogor : Institut Pertanian
Bogor.
- Haryati, Sri. 2009. *Peran Pendidikan dalam Mempercepat Pertumbuhan
Ekonomi Bangsa*.
- Sapa, Diana, Nazamudin, Riswandi. *Proyeksi Dana dan Perencanaan
Investasi Sektor Pendidikan Untuk Percepatan Pertumbuhan
Ekonomi Aceh*.





DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
Jln. 17 Agustus, Manado, 95119

Telp. (0431) 847 044 Fax. (0431) 862 204

Website: www.sulut.bps.go.id, Email: bps7100@bps.go.id